



**PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**

Jl. : Pasang Lambe' Kec. Tondon

**SURAT PERJANJIAN PEMBORONGAN
(KONTRAK KERJA)**

KEGIATAN BANTUAN KEUANGAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

**PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN RUAS
KABUPATEN PAKET 1**

NOMOR KONTRAK : 03/SP/PUTR-BHJP/VIII/2022
TANGGAL : 15 Agustus 2022
NILAI KONTRAK : Rp. 9.811.947.694,00

ANTARA

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KABUPATEN TORAJA UTARA**

DENGAN

PENYEDIA : CV. MATARI ALLO
ALAMAT : Jl. KIJANG NO. 33, TORAJA UTARA
TELEPON. : 082279889771
EMAIL : matariallo2019@gmail.com

TAHUN ANGGARAN 2022

Pada hari ini Senin tanggal **Lima Belas**, bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. I R W A N, ST. : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kegiatan Bantuan Keuangan Provinsi Tahun Anggaran 2022, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perkerjaan Umum dan Tata Ruang selaku Pengguna Anggaran Nomor 03/DPUPR/II/2022, tanggal 18 Februari 2022, tentang tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Pengadaan, Panitia Peneliti Kontrak, Direksi Teknis Dan Direksi Administrasi, Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2022. berdasarkan Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 14 untuk menerima pelimpahan kewenangan melalui Mandat sebagai PPK dari Pengguna Anggaran, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. HARTLAND SALEH : **Direktur CV. MATARI ALLO** Penyedia Jasa Konstruksi berdasarkan Akta Notaris Nomor 14 tanggal 10 September 1993 yang dikeluarkan oleh Notaris **DORKAS LATANNA, SH.** dan akta perubahan Nomor 13 tanggal 20 April 2020 yang dikeluarkan oleh Notaris **ALEXANDER SAMBENGA, SH** dalam hal ini berkedudukan sebagai pihak yang berwenang bertindak untuk dan atas nama CV. MATARI ALLO berkantor di Jalan Kijang No. 33 Toraja Utara Telp. 082279889771; Email : matariallo2019@gmail.com, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK, setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak Kerja) tentang PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN RUAS KABUPATEN PAKET 1 Kegiatan Bantuan Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa Nomor: 03/SPPBJ/DPUTR-BHJP/VIII/2022, Tanggal 12 Agustus 2022 dari Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Bantuan Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan Anggaran 2022. Kesepakatan tersebut kemudian dituangkan dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 **DASAR PERJANJIAN**

Kontrak Kerja antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA didasarkan pada :

- a. UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- b. UU Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- c. UU Jasa Konstruksi Nomor 2 Tahun 2017.
- d. Peraturan pemerintah Nomor 21 tahun 2021 Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko

- e. Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah
- g. Peraturan LKPP Nomor 21 tahun 2021 tentang Pedoman pengadaan barang/jasa pemerintah
- h. Peraturan Daerah Kab.Toraja Utara Nomor 08 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab.Toraja Utara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021 Nomor 8)
- i. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 78 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab.Toraja Utara Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021 Nomor 78)
- j. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 979/IV/TAHUN 2022, Tanggal 20 April Tahun 2022, Tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2022
- k. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang selaku Pengguna Anggaran Nomor 03/DPUPR/III/2022, tanggal 18 Februari 2022, tentang tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Pengadaan, Panitia Peneliti Kontrak, Direksi Teknis Dan Direksi Administrasi, Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2022.
- l. Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Perihal Penunjukan Penyedia Barang Jasa Nomor : 03/SPPBJ/DPUTR-BHJP/VIII/2022, tanggal 12 Agustus 2022
- m. Penetapan Pemenang Tender Nomor : 059/BA.LHP/JK/UKPBJ/VIII/2022, tanggal 09 agustus 2022
- n. Dokumen Pengadaan Nomor 03/PK.53/Pokja/VII/2022 tanggal 21 Juli 2022.

Pasal 2

TUJUAN

- (1) Melaksanakan PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN RUAS KABUPATEN PAKET 1 Kegiatan Bantuan Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan perencanaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Memberikan batasan hak dan kewajiban kedua belah pihak sehingga Kegiatan Bantuan Keuangan Provinsi Tahun Anggaran 2022 untuk PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN RUAS KABUPATEN PAKET 1 Kegiatan Bantuan Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2022 dapat dilaksanakan dan diselesaikan dengan baik, sesuai dengan ketentuan-ketentuan dokumen Kontrak Kerja.

Pasal 3

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA untuk PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN RUAS KABUPATEN PAKET 1 Kegiatan Bantuan Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Spesifikasi Teknis yang berlaku.
- (2) PIHAK KEDUA menyatakan menerima tugas dengan seksama sebagaimana dimaksud ayat (1) dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 4

LOKASI PEKERJAAN

Lokasi Pekerjaan tersebar pada beberapa ruas, meliputi :

- 1) Ruas Singki' - Pemanikan
- 2) Ruas Karre Limbong - Karre Penanian

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN

Hak dan Kewajiban PARA PIHAK adalah sebagai berikut :

(1) Hak PIHAK PERTAMA adalah :

- a. Meminta tanggungjawab penuh kepada PIHAK KEDUA terhadap pekerjaan yang dihasilkan.
- b. Meminta PIHAK KEDUA untuk menyiapkan personil dengan keahlian dan keterampilan yang cukup, bahan serta peralatan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Dokumen Penawaran.
- c. Meminta kepada PIHAK KEDUA agar personil, bahan dan peralatan tersebut huruf b khusus dipergunakan bagi pelaksanaan Kontrak Kerja ini dan tidak dapat dibenarkan untuk dipergunakan diluar kegiatan yang telah ditetapkan.
- d. Meminta pertanggungjawaban kepada PIHAK KEDUA atas kehilangan/kerusakan bahan dan peralatan di lokasi pekerjaan.
- e. Meminta PIHAK KEDUA untuk mengasuransikan keselamatan pekerjaan dari segala resiko selama pelaksanaan pekerjaan sampai serah terima pertama.
- f. Meminta kepada PIHAK KEDUA untuk memperbaiki pekerjaan yang cacat/rusak selama masa pemeliharaan agar hasil pekerjaan sesuai dengan pedoman dan persyaratan teknis dalam dokumen lelang.
- g. Meminta PIHAK KEDUA untuk menanggung segala kerugian akibat suara ribut, kebisingan dan gangguan yang timbul selama jangka waktu pekerjaan dari tuntutan ganti rugi yang disebabkan atau berhubungan dengan tanggung jawab tersebut.

(2) Kewajiban PIHAK PERTAMA :

- a. Memberikan peringatan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA apabila menurut pertimbangan PIHAK PERTAMA, Tenaga Ahli yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA tidak cakap/terampil sesuai dengan bidang keahliannya. PIHAK KEDUA harus segera mengganti dengan Tenaga Ahli lain yang disetujui PIHAK PERTAMA.
- b. Menyusun pedoman teknis dan persyaratan yang tertuang dalam dokumen lelang.
- c. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan PIHAK KEDUA dengan segala kemampuan, keahlian dan pengalaman yang dimiliki sehingga pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Mengawasi pekerjaan PIHAK KEDUA sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.
- e. Melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak Kerja.

(3) Hak PIHAK KEDUA adalah :

- a. Mengikuti pedoman teknis dan persyaratan yang tertuang dalam dokumen lelang.
- b. Mendapatkan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak Kerja.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA adalah:

- a. Wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- b. Bertanggung jawab penuh terhadap pekerjaan yang dihasilkan, sesuai yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, yaitu bertanggungjawab atas :
 - ❖ Pelaksanaan Kontrak;
 - ❖ Kualitas Barang/Jasa;
 - ❖ Ketepatan perhitungan jumlah dan volume;
 - ❖ Ketepatan waktu penyerahan; dan
 - ❖ Ketepatan tempat penyerahan

Serta bertanggungjawab apabila dikemudian hari terdapat kerugian negara terhadap hasil pekerjaan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.

- c. Wajib menyiapkan personil dengan keahlian dan keterampilan yang cukup, bahan serta peralatan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 3.
- d. Menyediakan personil, bahan dan peralatan tersebut ayat (1) Pasal ini khusus hanya dipergunakan bagi pelaksanaan Kontrak Kerja ini sebagaimana dimaksud Pasal 2 Kontrak Kerja ini dan tidak dapat dibenarkan untuk dipergunakan diluar kegiatan yang telah ditetapkan.
- e. Bertanggungjawab atas segala kehilangan/kerusakan bahan dan peralatan di lokasi pekerjaan.
- f. Mengasuransikan keselamatan pekerjaan dari segala resiko selama pelaksanaan pekerjaan sampai serah terima pertama.
- g. Memperbaiki pekerjaan yang cacat / rusak selama masa pemeliharaan agar hasil pekerjaan sesuai dengan pedoman dan persyaratan teknis dalam dokumen lelang.
- h. Menanggung segala kerugian akibat suara ribut, kebisingan dan gangguan dari yang timbul selama jangka waktu pekerjaan dari tuntutan ganti rugi yang disebabkan atau berhubungan dengan tanggung jawab tersebut.
- i. Melaksanakan pekerjaannya dengan segala kemampuan, keahlian dan pengalaman yang dimiliki sehingga pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- j. Menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 6

KESETARAAN GENDER DAN DISTABILITAS

- (1) PIHAK PERTAMA dalam pelaksanaan pekerjaannya mendorong kesetaraan gender dan distabilitas
- (2) Dalam mendorong kesetaraan gender, PIHAK PERTAMA memberikan kesempatan yang sama untuk pekerja laki-laki dan perempuan, memberikan upah dan gaji yang sama untuk jenis dan volume pekerjaan yang sama
- (3) Melibatkan penyandang distabilitas sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya

Pasal 7

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN DAN PEMELIHARAAN PEKERJAAN

- (1) Masa kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan masa pemeliharaan berakhir
- (2) Jangka waktu penyelesaian Pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender, terhitung sejak tanggal terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
- (3) Jangka waktu pemeliharaan pekerjaan selama 180 (Seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan.

Pasal 8

JENIS KONTRAK

Jenis Kontrak yang digunakan dalam Peningkatan Jalan Ruas Kabupaten Paket 1 Kegiatan Bantuan Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan adalah jenis Kontrak gabungan antara Kontrak Harga Satuan dan Kontrak Lumsum.

Pasal 9

DOKUMEN KONTRAK KERJA

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak ini, terdiri dari Adendum Surat Perjanjian (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Perintah Mulai Kerja, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas Harga, Syarat-syarat umum kontrak, Syarat-syarat khusus kontrak, beserta lampirannya berupa daftar personil manajerial dan peralatan utama, Rencana keselamatan konstruksi, spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti Surat Penunjukan penyedia barang/jasa, Surat

penyerahan lapangan, jadwal pelaksanaan, jaminan-jaminan, Berita acara rapat pre award meeting (PAM), Berita Acara rapat persiapan penandatanganan kontrak, Berita Acara rapat persiapan pelaksanaan kontrak.

- (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen lain, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut :
 - a. Adendum surat perjanjian (Apabila ada);
 - b. Surat perjanjian;
 - c. Surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga;
 - d. Syarat-syarat khusus kontrak;
 - e. Syarat-syarat umum kontrak;
 - f. Spesifikasi teknis;
 - g. Gambar-gambar

Pasal 10

NILAI KONTRAK KERJA

- (1) Nilai Pekerjaan sesuai Kontrak Kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 adalah sebesar **Rp. 9.811.947.694,00 (sembilan milyar delapan ratus sebelas juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah)** didasarkan atas harga unit price sesuai dengan Dokumen Kontrak Kerja.
- (2) Seluruh nilai pekerjaan sebagaimana tercantum dalam ayat (1) dibebankan pada Bantuan Keuangan Provinsi Sulawesi selatan yang dituangkan ke dalam APBD Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2022 dengan Nomor Rekening DPA-SKPD : 1.03.10.2.01.1.03.0.00.0.00.01.0000.5.2.04.01.01.0003.
- (3) Nilai pekerjaan sebagaimana tercantum dalam ayat (1) sudah termasuk didalamnya semua jenis pajak, bea materai dan pungutan-pungutan resmi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

JAMINAN PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KEDUA wajib menyerahkan surat jaminan pelaksanaan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah ditanda tangannya surat penunjukan pemenang untuk jaminan pelaksanaan pekerjaan.
- (2) Besarnya nilai jaminan pelaksanaan pekerjaan adalah sebesar 5% (lima persen) x Rp. 9.811.947.694,00 yaitu sebesar Rp. 490.597.385,00 (empat ratus sembilan puluh juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah) yang dikeluarkan oleh Asuransi atau Bank Penjamin.
- (3) Jaminan pelaksanaan berlaku sejak Kontrak Kerja ditandatangani sampai dengan berakhirnya masa kerja
- (4) Jaminan pelaksanaan dikembalikan kepada PIHAK KEDUA setelah berita acara penyerahan pertama kegiatan diterbitkan dan menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai pekerjaan sesuai Kontrak Kerja yaitu sebesar Rp. 490.597.385,00 (empat ratus sembilan puluh juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah) dari Asuransi yang berkedudukan di Toraja Utara atau Makassar.

Pasal 12

CARA PEMBAYARAN

Pembayaran nilai Pekerjaan sesuai Kontrak Kerja sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 dilaksanakan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- (1) Pembayaran Uang Muka
 - a. Setelah Kontrak Kerja ditandatangani PARA PIHAK, PIHAK KEDUA dapat mengambil uang muka maksimal sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai pekerjaan sesuai Kontrak Kerja yaitu sebesar Rp. 2.943.584.308,00 (dua milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta lima ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah) dengan ketentuan PIHAK KEDUA telah menyerahkan kepada PIHAK

- PERTAMA berupa Jaminan Uang Muka dari Perusahaan Asuransi Umum yang memiliki izin untuk menjual produk jaminan (suretyship) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan atau lembaga yang berwenang, dengan nilai sekurang-kurangnya sama dengan uang muka yang diberikan.
- b. Masa berlakunya Jaminan Uang Muka dihitung sejak tanggal permohonan pembayaran uang muka sampai dengan 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal berita acara penyerahan pertama pekerjaan.
 - c. Uang muka sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dapat diberikan hanya apabila PIHAK KEDUA mengajukan permohonan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA dengan mencantumkan rencana penggunaan uang muka.
 - d. Besarnya angsuran pengembalian uang muka diperhitungkan berangsur-angsur secara bertahap, dengan ketentuan bahwa uang muka tersebut selambat-lambatnya harus sudah lunas sebelum pembayaran akhir prestasi pekerjaan yang dilakukan dalam masa pelaksanaan kontrak dan atau apabila terjadi penghentian kontrak dan/atau pemutusan Kontrak Kerja.
 - e. Pengembalian uang muka secara bertahap dalam masa pelaksanaan kontrak sebagaimana tercantum pada pasal 11 ayat (1) huruf d adalah masa pelaksanaan kontrak sebagaimana yang diatur pada pasal 7 ayat (2)
- (2) Pembayaran nilai pekerjaan sebagaimana tercantum pada pasal 8 ayat (2) dilakukan berdasarkan kemajuan pekerjaan yang diterima oleh PIHAK PERTAMA dengan retensi 5 % (lima persen).
- (3) Pembayaran untuk hasil pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak ini dilaksanakan secara angsuran (Termin) berdasarkan prestasi kemajuan fisik dilapangan.
- Pembayaran tersebut diatas dilakukan berdasarkan permintaan pembayaran oleh PIHAK KEDUA dengan disertai Rincian Pembayaran, Laporan kemajuan Fisik, Berita Acara Hasil Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan, Laporan Harian dan Mingguan dan Bulanan serta foto-foto kegiatan yang sesuai dan laporan hasil pengujian laboratorium, dilengkapi dengan Surat Rekomendasi pembayaran terhadap pemeriksaan hasil pekerjaan dari konsultan pengawas kepada PIHAK PERTAMA, berdasarkan persetujuan Pengguna Anggaran kegiatan ini.
- (4) Jumlah yang dibayarkan kepada PIHAK KEDUA pada setiap pembayaran adalah Jumlah Nilai Kemajuan Pekerjaan dikurangi Pengembalian Uang Muka secara proporsional dari setiap nilai tagihan.
- (5) Pembayaran untuk pekerjaan prestasi 100% (seratus persen) atau pekerjaan selesai dimana Serah Terima Pekerjaan sudah dilaksanakan, nilai pekerjaan yang akan dibayar 100% (seratus persen) dikurangi dengan pengembalian uang muka. Pembayaran yang sudah dilakukan pada angsuran sebelumnya, sisa pengenaan denda (bila ada) dengan syarat bahwa PIHAK KEDUA harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar tidak kurang dari 5 % (lima persen) dari nilai Kontrak Kerja
- (6) Pembayaran prestasi 100% (seratus persen) pekerjaan berdasarkan dengan capaian kinerja atas pelaksanaan kegiatan fisik jalan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA, dan disesuaikan dengan hasil verifikasi tim pendamping dari Inspektorat Daerah Kabupaten Toraja Utara.
- (7) Retensi sebesar 5% (lima persen) dari nilai pekerjaan sesuai Kontrak Kerja, dapat dicairkan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan diganti dengan jaminan pemeliharaan yang dikeluarkan oleh Bank Pemerintah atau Asuransi dan berlaku sampai dengan akhir masa pemeliharaan sesuai Berita Acara Serah Terima Kedua Pekerjaan.

Pasal 13

KESELAMATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA

- (1) PIHAK KEDUA wajib memakai dan membayar ASTEK (Asuransi Tenaga Kerja) berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pekerjaan Umum No. 30/KPTS/84 dan No. 07/Men/1984 dari Menteri Tenaga Kerja.
- (2) PIHAK KEDUA mematuhi peraturan keselamatan dan kesehatan kerja pada lokasi pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Surat Keputusan bersama Menteri Tenaga Kerja dan Peraturan Menteri PUPR Nomor 21 tahun 2019 tentang SMKK

- (3) Apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan (2) maka PIHAK PERTAMA dapat menunda sebagian atau seluruh angsuran pembayaran atas prestasi pekerjaan kepada PIHAK KEDUA sampai kewajiban tersebut dipenuhi.
- (4) PIHAK PERTAMA tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang disebabkan karena kecelakaan yang menimpa setiap pekerja atau orang lain yang berada di lokasi pelaksanaan pekerjaan.

Pasal 14 **SANKSI DAN DENDA**

- (1) Apabila terbukti bahwa pelaksanaan pekerjaan kegiatan ini tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak Kerja yang mengakibatkan terjadinya penyimpangan mutu kegiatan, jadwal pelaksanaan dan administrasi Kontrak Kerja, maka PIHAK PERTAMA dapat melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Memberikan peringatan-peringatan secara tertulis.
 - b. Memberikan perintah pembongkaran / penggantian.
 - c. Melakukan pemutusan hubungan kontrak kerja.
- (2) Dalam hal PIHAK KEDUA terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu pelaksanaan pekerjaan, kepada PIHAK KEDUA dikenakan denda keterlambatan sebesar 1 ‰ (satu perseribu) dari nilai bagian Kontrak Kerja yang belum dapat difungsikan/dimanfaatkan untuk setiap hari kalender keterlambatan terhitung sejak jangka waktu pelaksanaan habis.
- (3) Besarnya denda keterlambatan sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak dibatasi sehingga apabila denda keterlambatan sudah melampaui nilai jaminan pelaksanaan PIHAK PERTAMA dapat memutuskan kontrak kerja secara sepihak dan PIHAK KEDUA tidak dapat menuntut kerugian atas pemutusan kontrak tersebut.
- (4) Pemutusan Kontrak Kerja secara sepihak oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana tersebut ayat (3) dilaksanakan dengan pemberitahuan tertulis oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dan pemutusan kontrak kerja secara sepihak tersebut tidak menghilangkan hak PIHAK PERTAMA untuk melanjutkan pekerjaan sesuai dengan aturan yang berlaku.
- (5) PIHAK KEDUA wajib membayar denda keterlambatan sebesar 1‰ (satu perseribu) untuk setiap hari keterlambatan sampai sebanyak-banyaknya sebesar 5% (lima persen) dari nilai pekerjaan sesuai kontrak kerja dalam hal :
 - a. Setelah mendapat peringatan tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut tidak mengindahkan hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Pasal 5.
 - b. Tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sebagaimana tercantum pada Pasal 6.
- (6) Denda-denda sebagaimana tercantum pada ayat (2) dan (3) akan diperhitungkan dengan kewajiban pembayaran PIHAK PERTAMA.

Pasal 15 **PERUBAHAN, PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN PEKERJAAN**

- (1) PIHAK PERTAMA dapat melakukan perubahan mengenai volume pekerjaan atau suatu bagian pekerjaan yang dianggap perlu atau dianggap lebih dan PIHAK PERTAMA mempunyai wewenang menetapkan kepada PIHAK KEDUA untuk menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam dokumen Kontrak Kerja, pekerjaan tambah dan kurang tersebut tidak akan mempengaruhi nilai kontrak kerja.
- (2) Perubahan-perubahan pekerjaan tidak boleh dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA tanpa suatu perintah perubahan tertulis oleh Direksi atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- (3) Kegiatan tambah dan kurang tidak dapat dipakai alasan untuk menambah waktu penyelesaian pekerjaan, kecuali atas persetujuan secara tertulis dari PIHAK PERTAMA.
- (4) Kegiatan tambah dan kurang, perpanjangan waktu pelaksanaan kegiatan atau perubahan-perubahan lainnya, harus diikuti dengan Pembuatan Adendum Kontrak Kerja.

Pasal 16
PENGENDALIAN, SUPERVISI DAN PENANGGUNG JAWAB

- (1) Pengendalian atas penyelenggaraan pekerjaan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA.
- (2) Supervisi (pengawasan) terhadap pelaksanaan pekerjaan di lapangan dilakukan oleh tim pengawas yang namanya akan dinyatakan secara tertulis oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK KEDUA harus menyampaikan secara tertulis Pelaksana Lapangan untuk mendapat persetujuan dari PIHAK PERTAMA dan persetujuan tersebut sewaktu-waktu dapat dicabut apabila PIHAK PERTAMA berpendapat bahwa Pelaksana Lapangan tersebut tidak cakap dalam melaksanakan tugasnya.
- (4) Dalam hal Pelaksana Lapangan tidak cakap dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) PIHAK KEDUA wajib mengganti Pelaksana Lapangan atas persetujuan PIHAK PERTAMA.
- (5) Pengendalian PIHAK PERTAMA berlaku baik terhadap PIHAK KEDUA, maupun terhadap tim pengawas (Supervisor Team).
- (6) Untuk keperluan pengendalian dan supervisi, PIHAK KEDUA harus membuat laporan kemajuan fisik pekerjaan secara rutin baik harian, mingguan dan bulanan.

Pasal 17
KEDUDUKAN HUKUM

- (1) Untuk pelaksanaan Kontrak Kerja ini kedua belah pihak mempunyai tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan tidak berubah di wilayah kerja Kantor Pengadilan Negeri Toraja.
- (2) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Kerja ini, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan PIHAK PERTAMA untuk mengusulkan agar PIHAK KEDUA tidak diikuti sertakan dalam Tender.

Pasal 18
KERUGIAN AKIBAT KEADAAN MEMAKSA
(FORCE MAJEURE)

- (1) Yang dianggap sebagai keadaan memaksa (Force Majeure) adalah semua kejadian diluar kemampuan PIHAK KEDUA yang mempengaruhi jalannya pelaksanaan kegiatan yaitu :
 - a. Bencana alam (yang dinyatakan oleh Pemerintah setempat) yaitu : gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor dan kebakaran.
 - b. Peperangan, pemberontakan.
 - c. Peraturan Perundang-Undangan dibidang moneter yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Kontrak Kerja.
- (2) Apabila terjadi keadaan memaksa (Force Majeure), maka PIHAK KEDUA dibebaskan dari tanggungan atas kerugian dan keterlambatan penyelesaian kegiatan.
- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa (Force Majeure), maka PIHAK KEDUA wajib mengambil langkah-langkah untuk mencegah kemungkinan terjadinya kerugian yang lebih besar atas persetujuan PIHAK PERTAMA.
- (4) Untuk keperluan perhitungan atas kerugian yang mungkin terjadi PIHAK KEDUA perlu segera mengambil tindakan atau langkah pengumpulan data mengenai kegiatan dengan mengambil dokumentasi atau foto dan wajib melaporkan kepada Direksi / Pengawas Lapangan kegiatan secara tertulis selambat-lambatnya 3 x 24 (3 kali dua puluh empat) jam setelah terjadinya peristiwa diikuti laporan terperinci secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya peristiwa tersebut kepada PIHAK PERTAMA.
- (5) Apabila PIHAK KEDUA lalai melaporkan secara tertulis, sehingga melampaui batas waktu sebagaimana tercantum pada ayat (4) PIHAK KEDUA kehilangan haknya untuk mengajukan klaim atas kejadian tersebut.

Pasal 19
PEMUTUSAN PERJANJIAN

- (1) PIHAK PERTAMA dapat membatalkan secara sepihak perjanjian ini tanpa menggunakan pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam hal :
 - a. PIHAK KEDUA tidak melaksanakan tugas sebagaimana tercantum dalam Pasal 3.
 - b. Jika jangka waktu yang ditetapkan dalam pasal 6 ayat (1) tidak ditepati, sedangkan PIHAK PERTAMA telah memberikan peringatan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dan tidak diindahkan oleh PIHAK KEDUA.
 - c. PIHAK KEDUA lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.
 - d. PIHAK KEDUA tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan.
 - e. PIHAK KEDUA menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari dan penghentian ini tidak tercantum dalam Kegiatan mutu serta tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan.
 - f. PIHAK KEDUA berada dalam keadaan pailit.
 - g. PIHAK KEDUA selama masa kontrak gagal memperbaiki cacat mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK.
 - h. PIHAK KEDUA tidak mempertahankan keberlakuan Jaminan Pelaksanaan.
 - i. PIHAK KEDUA tidak melaksanakan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender.
 - j. PPK tidak menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).
 - k. PIHAK KEDUA terbukti melakukan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN), kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang.
 - l. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
 - m. Jika dana bantuan dari pemerintah provinsi dihentikan, dan daerah tidak memiliki kemampuan pendanaan untuk melanjutkan pelaksanaan pekerjaan.
- (2) Jika terjadi pemutusan Kontrak Kerja PIHAK PERTAMA dapat menunjuk rekanan lain untuk menyelesaikan pekerjaan ini.
- (3) Jika terjadi pemutusan Kontrak Kerja akibat penghentian dana bantuan dari pemerintah provinsi seperti yang disebutkan pada pasal 19 ayat (1) huruf m, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat menghentikan Kontrak kerja.

Pasal 20
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Jika terjadi perselisihan diantara PARA PIHAK maka diselesaikan secara musyawarah mufakat.
- (2) Jika perselisihan itu tidak diselesaikan dengan musyawarah mufakat, maka akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Toraja.

Pasal 21
PENGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

- (1) Merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menggunakan produk dalam negeri di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran pekerjaan.
- (2) Dalam penerapannya mengacu pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi

dalam rangka menyukseskan gerakan nasional bangga buatan Indonesia pada pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pasal 22
LAIN – LAIN

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Kontrak Kerja atau perubahan yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Pemborongan Tambahan (Addendum) dan merupakan perjanjian yang tidak terpisahkan dari Kontrak Kerja ini.
- (2) Dengan ditandatanganinya kontrak kerja oleh PARA PIHAK, maka seluruh ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal kontrak kerja dan seluruh ketentuan dalam dokumen-dokumen, termasuk segala sanksinya, mempunyai kekuatan mengikat dan berlaku sebagai Undang-Undang bagi PARA PIHAK berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- (3) Dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah dokumen-dokumen sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 dan dokumen-dokumen yang diterbitkan menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Pasal 23
PENUTUP

- (1) Kontrak Kerja ini ditandatangani oleh PARA PIHAK di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tercantum pada awal Kontrak Kerja ini.
- (2) Kontrak Kerja beserta lampiran-lampirannya merupakan bagian tak terpisahkan, dibuat dalam rangkap 7 (tujuh) dengan dua asli bermaterai Rp. 10.000,00 asli pertama untuk PIHAK PERTAMA dan asli kedua untuk PIHAK KEDUA dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PARA PIHAK

PIHAK PERTAMA

Atas Nama Pengguna Anggaran
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

PIHAK KEDUA

Penyedia Jasa Konstruksi
CV. MATARI ALLO

IRWAN, S T

NIP. : 19820526 201101 1 008

HARTLAND SALEH

Direktur

Mengetahui dan Menyetujui :
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab.Toraja Utara/PA

Drs. Paulus Tandung, M.Si

NIP. 19660607 199203 1 012



PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Jl. : Pasang Lambe' Kec. Tondon

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

A. KETENTUAN UMUM	
1. Definisi	<p>Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak selanjutnya disebut SSUK harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut:</p> <p>1.1 Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.</p> <p>1.2 Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan adalah bagian pekerjaan utama atau bagian pekerjaan bukan utama yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan yang pelaksanaannya diserahkan kepada Penyedia lain (subpenyedia) dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK.</p> <p>1.3 Bagian kontrak adalah bagian pekerjaan yang tercantum di dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak. Penyelesaian masing-masing pekerjaan yang tercantum pada bagian kontrak tersebut tidak tergantung satu sama lain dan memiliki fungsi yang berbeda, dimana fungsi masing-masing bagian kontrak tersebut tidak terkait satu sama lain dalam pencapaian kinerja pekerjaan.</p> <p>1.4 Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga adalah daftar kuantitas/keluaran yang telah diisi harga satuan kuantitas/keluaran sesuai ketentuan pemberlakuannya dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran.</p> <p>1.5 Direksi Lapangan adalah tenaga/tim pendukung yang dibentuk/ditetapkan oleh PPK, terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih, untuk mengelola administrasi Kontrak dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan.</p> <p>1.6 Harga Kontrak adalah total harga pelaksanaan pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak.</p> <p>1.7 Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK.</p> <p>1.8 Harga Satuan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat HSP adalah harga satu jenis pekerjaan tertentu per satu satuan tertentu.</p> <p>1.9 Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan adalah kerangka waktu yang sudah terinci berdasarkan Masa Pelaksanaan, setelah dilaksanakan pemeriksaan lapangan bersama dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan Kontrak.</p> <p>1.10 Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam Kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.</p>

	<p>1.11 Kegagalan Konstruksi adalah keadaan hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan sebagaimana disepakati dalam kontrak baik sebagian maupun keseluruhan sebagai akibat kesalahan Pengguna atau Penyedia.</p> <p>1.12 Kegagalan Bangunan adalah suatu keadaan keruntuhan bangunan dan/atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir hasil Jasa Konstruksi.</p> <p>1.13 Kerja Sama Operasi yang selanjutnya disingkat KSO adalah kerja sama usaha antar Penyedia yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis.</p> <p>1.14 Kontrak Kerja Konstruksi selanjutnya disebut Kontrak adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara PPK dengan Penyedia dalam pelaksanaan jasa konsultasi konstruksi atau pekerjaan konstruksi.</p> <p>1.15 Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan adalah Kontrak yang merupakan gabungan lumsum dan harga satuan dalam 1 (satu) pekerjaan yang diperjanjikan.</p> <p>1.16 Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah.</p> <p>1.17 Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan APBD yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.</p> <p>1.18 Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang kewenangannya diatur dalam pepres 16 tahun 2018 dan dapat menerima mandat pelimpahan kewenangan dari Pengguna Anggaran (PA)/KPA sesuai dengan undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan.</p> <p>1.19 Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.</p> <p>1.20 Masa Pelaksanaan adalah jangka waktu untuk melaksanakan seluruh pekerjaan terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan.</p> <p>1.21 Masa Pemeliharaan adalah jangka waktu untuk melaksanakan kewajiban pemeliharaan oleh Penyedia, terhitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.</p> <p>1.22 Mata Pembayaran Utama adalah mata pembayaran yang pokok dan penting yang nilai bobot kumulatifnya minimal 80% (delapan puluh perseratus) dari seluruh nilai pekerjaan, dihitung mulai dari mata pembayaran yang nilai bobotnya terbesar.</p> <p>1.23 Metode Pelaksanaan Pekerjaan adalah metode yang menggambarkan penguasaan penyelesaian pekerjaan yang sistematis dari awal sampai akhir meliputi tahapan/urutan pekerjaan utama dan uraian/cara kerja dari masing-</p>
--	--

	<p>masing jenis kegiatan pekerjaan utama yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis.</p>
1.24	<p>Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PPHP adalah tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.</p>
1.25	<p>Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.</p>
1.26	<p>Pekerjaan Utama adalah jenis pekerjaan yang secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu konstruksi sesuai peruntukannya yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan.</p>
1.27	<p>Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.</p>
1.28	<p>Pengawas Pekerjaan atau Direksi Teknis adalah tim pendukung yang ditunjuk/ditetapkan oleh PPK yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.</p>
1.29	<p>Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan Kontrak.</p>
1.30	<p>Personel Manajerial adalah tenaga ahli atau tenaga teknis yang ditempatkan sesuai penugasan pada organisasi pelaksanaan pekerjaan.</p>
1.31	<p>Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang diberikan kepada Peserta pemilihan/Penyedia berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di seluruh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu.</p>
1.32	<p>Subpenyedia adalah Penyedia yang mengadakan perjanjian kerja tertulis dengan Penyedia penanggung jawab Kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak).</p>
1.33	<p>Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi/lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia/Konsorsium Perusahaan Asuransi Umum/Konsorsium Lembaga Penjaminan/Konsorsium Perusahaan Penjaminan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.</p>
1.34	<p>Surat Perintah Mulai Kerja yang selanjutnya disingkat SPMK adalah surat yang diterbitkan oleh PPK kepada Penyedia untuk memulai melaksanakan pekerjaan.</p>
1.35	<p>Tanggal Mulai Kerja adalah tanggal yang dinyatakan pada SPMK yang diterbitkan oleh PPK untuk memulai melaksanakan pekerjaan.</p>
1.36	<p>Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan adalah tanggal serah terima</p>

	<p>pertama pekerjaan selesai (<i>Provisional Hand Over/PHO</i>) dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan yang diterbitkan oleh PPK.</p> <p>1.37 Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan adalah tanggal serah terima akhir pekerjaan selesai (<i>Final Hand Over/FHO</i>) dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan yang diterbitkan oleh PPK.</p> <p>1.38 Tenaga Kerja Konstruksi adalah tenaga kerja yang bekerja di sektor konstruksi yang meliputi ahli, teknisi atau analis, dan operator.</p>
2. Penerapan	SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi ini tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Surat Perjanjian.
3. Bahasa dan Hukum	<p>3.1 Bahasa kontrak harus dalam Bahasa Indonesia.</p> <p>3.2 Dalam hal Kontrak dilakukan dengan pihak asing harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dalam hal terjadi perselisihan dengan pihak asing digunakan Kontrak dalam bahasa Indonesia.</p> <p>3.3 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia.</p>
4. Korespondensi	<p>4.1 Semua korespondensi dapat berbentuk surat, surat elektronik (<i>e-mail</i>) dan/atau faksimili dengan alamat tujuan para pihak yang tercantum dalam SSKK.</p> <p>4.2 Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada Wakil Sah Para Pihak dalam SSKK, atau jika disampaikan melalui surat tercatat dan/atau faksimili ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK.</p>
5. Wakil Sah Para Pihak	<p>5.1 Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh PPK atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh Wakil Sah Para Pihak atau pejabat yang disebutkan dalam SSKK.</p> <p>5.2 Kewenangan Wakil Sah Para Pihak diatur dalam Surat Keputusan dari Para Pihak dan harus disampaikan kepada masing-masing pihak.</p> <p>5.3 Direksi Lapangan yang ditunjuk menjadi Wakil Sah PPK memiliki tugas: <ul style="list-style-type: none"> a. melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari PPK; b. mengelola administrasi kontrak; dan c. mengendalikan pelaksanaan pekerjaan. </p>
6. Larangan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), Penyalahgunaan Wewenang serta Penipuan	<p>6.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk: <ul style="list-style-type: none"> a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini; b. mendorong terjadinya persaingan tidak sehat; dan/atau c. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan </p>

	<p>Kontrak ini.</p> <p>6.2 Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan termasuk semua anggota KSO (apabila berbentuk KSO) dan subpenyediannya (jika ada) tidak pernah dan tidak akan melakukan tindakan yang dilarang pada pasal 6.1 di atas.</p> <p>6.3 Penyedia yang menurut penilaian PPK terbukti melakukan larangan-larangan di atas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif oleh PPK sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pemutusan Kontrak; b. Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetorkan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK; c. sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan dan disetorkan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK; dan d. peneanaan Sanksi Daftar Hitam. <p><i>[catatan: peneanaan Sanksi Daftar Hitam ditetapkan oleh PA/KPA atas usulan PPK. PA/KPA menyampaikan dokumen penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyedia yang dikenakan Sanksi Daftar Hitam; dan 2) unit kerja yang melaksanakan fungsi layanan pengadaan secara elektronik, untuk ditayangkan dalam Daftar Hitam Nasional] <p>6.4 Peneanaan sanksi administratif di atas dilaporkan oleh PPK kepada PA/KPA.</p> <p>6.5 PPK yang terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
7. Asal Material/ Bahan	<p>7.1 Penyedia harus menyampaikan asal material/bahan yang terdiri dari rincian komponen dalam negeri dan komponen impor.</p> <p>7.2 Asal material/bahan merupakan tempat material/bahan diperoleh, antara lain tempat material/bahan ditambang, tumbuh, atau diproduksi.</p>
8. Pembukuan	<p>Penyedia diharapkan untuk melakukan pencatatan keuangan yang akurat dan sistematis sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.</p>
9. Perpajakan	<p>Penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan Tenaga Kerja Konstruksi yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Harga Kontrak</p>
10. Pengalihan Seluruh Kontrak	<p>10.1 Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (<i>merger</i>) maupun akibat lainnya.</p> <p>10.2 Jika ketentuan di atas dilanggar maka Kontrak diputuskan sepihak oleh PPK dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 41.2.</p>
11. Pengabaian	<p>Jika terjadi pengabaian oleh satu pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian.</p>

12. Penyedia Mandiri	Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggung jawab penuh terhadap personil dan subpenyediannya (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh mereka.
13. KSO	KSO memberi kuasa kepada salah satu anggota yang disebut dalam Surat Perjanjian untuk bertindak atas nama KSO dalam pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap PPK berdasarkan Kontrak ini.
14. Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan	<p>14.1 PPK menetapkan Pengawas Pekerjaan (Direksi Teknis) untuk melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan sesuai Kontrak ini. Pengawas Pekerjaan dapat berasal dari personel PPK atau Penyedia Jasa Pengawasan (Konsultan Pengawas).</p> <p>14.2 Dalam melaksanakan kewajibannya, Pengawas Pekerjaan bertindak profesional. Jika tercantum dalam SSKK, Pengawas Pekerjaan yang berasal dari Personel PPK dapat bertindak sebagai Wakil Sah PPK.</p>
15. Tugas dan Wewenang Pengawas Pekerjaan	<p>15.1 Semua gambar dan rencana kerja yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai Kontrak, untuk pekerjaan permanen maupun pekerjaan sementara harus mendapatkan persetujuan dari Pengawas Pekerjaan.</p> <p>15.2 Jika dalam pelaksanaan pekerjaan ini diperlukan terlebih dahulu ada pekerjaan sementara yang tidak tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga di dalam Kontrak maka Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan spesifikasi dan gambar usulan pekerjaan sementara tersebut untuk mendapatkan pernyataan tidak keberatan (<i>no objection</i>) dari Pengawas Pekerjaan untuk dilaksanakan. Pernyataan tidak keberatan atas rencana pekerjaan sementara ini tidak melepaskan Penyedia dari tanggung jawabnya sesuai Kontrak.</p> <p>15.3 Pengawas Pekerjaan melaksanakan tugas dan wewenang paling sedikit meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mengevaluasi dan menyetujui rencana mutu pekerjaan konstruksi Penyedia Jasa pelaksana konstruksi; b. memberikan ijin dimulainya setiap tahapan pekerjaan; c. memeriksa dan menyetujui kemajuan pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak; d. memeriksa dan menilai mutu dan keselamatan konstruksi terhadap hasil akhir pekerjaan; e. menghentikan setiap pekerjaan yang tidak memenuhi persyaratan; f. bertanggungjawab terhadap hasil pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi sesuai tugas dan tanggungjawabnya; dan g. memberikan laporan secara periodik kepada PPK sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak. <p>15.4 Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini.</p>
16. Penemuan-penemuan	Penyedia wajib memberitahukan kepada PPK dan kepada pihak yang berwenang semua penemuan benda/barang yang mempunyai nilai sejarah atau penemuan kekayaan di lokasi pekerjaan yang menurut peraturan perundang-undangan dikuasai oleh negara.
17. Akses ke Lokasi	17.1 Penyedia berkewajiban untuk menjamin akses PPK, Wakil Sah PPK, Pengawas

Kerja	<p>Pekerjaan dan/atau pihak yang mendapat izin dari PPK ke lokasi kerja dan lokasi lainnya dimana pekerjaan ini sedang atau akan dilaksanakan.</p> <p>17.2 Penyedia harus dianggap telah menerima kelayakan dan ketersediaan jalur akses menuju lapangan. Penyedia harus berupaya menjaga setiap jalan atau jembatan dari kerusakan akibat penggunaan/lalu lintas Penyedia atau akibat personel Penyedia. Kecuali ditentukan lain maka:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penyedia harus bertanggung jawab atas pemeliharaan yang mungkin diperlukan akibat penggunaan jalur akses; b. Penyedia harus menyediakan rambu atau petunjuk sepanjang jalur akses, dan mendapatkan perizinan yang mungkin disyaratkan oleh otoritas terkait untuk penggunaan jalur, rambu, dan petunjuk; c. biaya karena ketidaklayakan atau tidak tersedianya jalur akses untuk digunakan oleh Penyedia, harus ditanggung Penyedia; dan d. PPK tidak bertanggung jawab atas klaim yang mungkin timbul akibat penggunaan jalur akses. <p>17.3 PPK tidak bertanggung jawab atas klaim yang mungkin timbul selain penggunaan jalur akses tersebut.</p>
B. PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, ADENDUM DAN PEMUTUSAN KONTRAK	
18. Masa Pelaksanaan Kontrak	Kontrak ini berlaku efektif sejak penandatanganan Surat Perjanjian oleh Para Pihak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan dan hak dan kewajiban Para Pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi.
B.1 Pelaksanaan Pekerjaan	
19. Penyerahan Lokasi Pekerjaan	<p>19.1 Sebelum penyerahan lokasi kerja dilakukan peninjauan lapangan bersama oleh para pihak.</p> <p>19.2 PPK berkewajiban untuk menyerahkan lokasi kerja sesuai dengan kebutuhan Penyedia yang tercantum dalam rencana kerja yang telah disepakati oleh para pihak dalam Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, untuk melaksanakan pekerjaan tanpa ada hambatan kepada Penyedia sebelum SPMK diterbitkan.</p> <p>19.3 Lokasi pekerjaan yang maksud selain yang tertuang dalam kontrak Pasal 4, juga termasuk lokasi yang disebutkan dalam SSKK,</p> <p>19.4 Hasil peninjauan dan penyerahan dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Lokasi Kerja.</p> <p>19.5 Jika dalam peninjauan lapangan bersama ditemukan hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam adendum Kontrak.</p> <p>19.6 Jika PPK tidak dapat menyerahkan lokasi kerja sesuai kebutuhan Penyedia yang tercantum dalam rencana kerja (sesuai pasal 19.2) untuk melaksanakan pekerjaan dan terbukti merupakan suatu hambatan, maka kondisi ini ditetapkan sebagai Peristiwa Kompensasi.</p>
20. Surat Perintah Mulai	20.1 PPK menerbitkan SPMK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penandatanganan Kontrak atau 14 (empat belas) hari kerja sejak penyerahan

<p>Kerja (SPMK)</p>	<p>lokasi kerja pertama kali.</p> <p>20.2 Dalam SPMK dicantumkan seluruh lingkup pekerjaan dan Tanggal Mulai Kerja.</p>
<p>21. Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK)</p>	<p>21.1 Penyedia berkewajiban untuk mempresentasikan dan menyerahkan RMPK sebagai penjaminan dan pengendalian mutu pelaksanaan pekerjaan pada rapat persiapan pelaksanaan Kontrak, kemudian dibahas dan disetujui oleh PPK.</p> <p>21.2 RMPK disusun paling sedikit berisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Rencana Pelaksanaan Pekerjaan (<i>Method Statement</i>); b. Rencana Pemeriksaan dan Pengujian/<i>Inspection and Test Plan (ITP)</i>; dan c. Pengendalian Subpenyedia dan Pemasok. <p>21.3 Penyedia wajib menerapkan dan mengendalikan pelaksanaan RMPK secara konsisten untuk mencapai mutu yang dipersyaratkan pada pelaksanaan pekerjaan ini.</p> <p>21.4 RMPK dapat direvisi sesuai dengan kondisi pekerjaan.</p> <p>21.5 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan RMPK jika terjadi Adendum Kontrak dan/atau Peristiwa Kompensasi.</p> <p>21.6 Pemutakhiran RMPK harus menunjukkan perkembangan kemajuan setiap pekerjaan dan dampaknya terhadap penjadwalan sisa pekerjaan, termasuk perubahan terhadap urutan pekerjaan. Pemutakhiran RMPK harus mendapatkan persetujuan PPK.</p> <p>21.7 Persetujuan PPK terhadap RMPK tidak mengubah kewajiban kontraktual Penyedia.</p>
<p>22. Rencana Keselamatan Konstruksi</p>	<p>22.1 Penyedia berkewajiban untuk mempresentasikan dan menyerahkan RKK pada saat rapat persiapan pelaksanaan Kontrak, kemudian pelaksanaan RKK dibahas dan disetujui oleh PPK.</p> <p>22.2 Para Pihak wajib menerapkan dan mengendalikan pelaksanaan RKK secara konsisten.</p> <p>22.3 RKK menjadi bagian dari Dokumen Kontrak.</p> <p>22.4 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan RKK sesuai dengan kondisi pekerjaan, jika terjadi perubahan maka dituangkan dalam adendum Kontrak.</p> <p>22.5 Pemutakhiran RKK harus mendapat persetujuan PPK.</p> <p>22.6 Persetujuan PPK terhadap pelaksanaan RKK tidak mengubah kewajiban kontraktual Penyedia.</p>
<p>23. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak</p>	<p>23.1 Paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak diterbitkannya SPMK dan sebelum pelaksanaan pekerjaan, PPK bersama dengan Penyedia, unsur perancangan, dan unsur pengawasan, harus sudah menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak.</p> <p>23.2 Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. RMPK; b. pelaksanaan RKK;

	<ul style="list-style-type: none"> c. organisasi kerja; d. tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan; e. jadwal pelaksanaan pekerjaan, yang diikuti uraian tentang metode kerja yang memperhatikan Keselamatan dan Kesehatan Kerja; f. jadwal pengadaan bahan/material, mobilisasi peralatan dan Tenaga Kerja Konstruksi; g. penyusunan rencana pengukuran/pemeriksaan bersama; dan h. hal-hal lain yang dianggap perlu. <p>23.3 Hasil rapat persiapan pelaksanaan Kontrak dituangkan dalam Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.</p>
24. Mobilisasi	<p>24.1 Mobilisasi paling lambat harus sudah mulai dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan SPMK, atau sesuai kebutuhan dan rencana kerja.</p> <p>24.2 Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. mendatangkan peralatan-peralatan terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan, termasuk instalasi alat; b. mempersiapkan fasilitas seperti kantor, rumah, gedung laboratorium, bengkel, gudang, dan sebagainya; dan/atau c. mendatangkan Tenaga Kerja Konstruksi. <p>24.3 Mobilisasi peralatan dan Tenaga Kerja Konstruksi dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.</p>
25. Pengukuran/ Pemeriksaan bersama	<p>25.1 Pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, PPK dan Pengawas Pekerjaan bersama-sama dengan Penyedia melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail terhadap kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap rencana mata pembayaran, Tenaga Kerja Konstruksi, dan Peralatan Utama (<i>Mutual Check 0%</i>).</p> <p>25.2 Pada tahapan pengukuran/pemeriksaan bersama, PA/KPA telah membentuk Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak.</p> <p>25.3 Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pengukuran/pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam addendum Kontrak.</p> <p>25.4 Tenaga Kerja Konstruksi dan/atau Peralatan Utama yang sesuai dengan persyaratan Kontrak dapat segera dimobilisasi.</p> <p>25.5 Tindak lanjut hasil pemeriksaan bersama Tenaga Kerja Konstruksi dan/atau Peralatan Utama mengikuti ketentuan pasal 65 dan 66.</p>
26. Penggunaan Produksi Dalam Negeri	<p>26.1 Dalam pelaksanaan pekerjaan ini, Penyedia berkewajiban mengutamakan material/bahan produksi dalam negeri dan tenaga kerja Indonesia untuk pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia sesuai dengan yang disampaikan pada saat penawaran.</p> <p>26.2 Dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi, bahan baku, Tenaga Kerja Konstruksi, dan perangkat lunak yang digunakan mengacu kepada dokumen:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. formulir rekapitulasi perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN),

	<p>untuk Penyedia yang mendapat preferensi harga; dan</p> <p>b. daftar barang yang diimpor, untuk barang yang diimpor.</p> <p>26.3 Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan ditemukan ketidaksesuaian dengan dokumen pada pasal 26.2, maka akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.</p>
B.2 Pengendalian Waktu	
27. Masa Pelaksanaan	<p>27.1 Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, Penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan RMPK, serta menyelesaikan pekerjaan paling lambat selama Masa Pelaksanaan yang dinyatakan dalam SSKK.</p> <p>27.2 Apabila Penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai Masa Pelaksanaan karena di luar pengendaliannya yang dapat dibuktikan demikian, dan Penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, dengan disertai bukti-bukti yang dapat disetujui PPK, maka PPK dapat memberlakukan Peristiwa Kompensasi dan melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas Penyedia dengan membuat addendum Kontrak.</p> <p>27.3 Jika pekerjaan tidak selesai sesuai Masa Pelaksanaan bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia dikenakan denda.</p> <p>27.4 Apabila diberlakukan serah terima sebagian pekerjaan (secara parsial), Masa Pelaksanaan dibuat berdasarkan bagian pekerjaan tersebut sesuai dengan SSKK.</p> <p>27.5 Bagian pekerjaan pada pasal 27.4 adalah bagian pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.</p>
28. Penundaan oleh Pengawas Pekerjaan	Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan secara tertulis Penyedia untuk menunda pelaksanaan pekerjaan. Setiap perintah penundaan ini harus segera ditembuskan kepada PPK.
29. Rapat Pemantauan	<p>29.1 Pengawas Pekerjaan atau Penyedia dapat menyelenggarakan rapat pemantauan dan meminta satu sama lain untuk menghadiri rapat tersebut. Rapat pemantauan diselenggarakan untuk membahas perkembangan pekerjaan dan perencanaan atas sisa pekerjaan serta untuk menindaklanjuti peringatan dini.</p> <p>29.2 Hasil rapat pemantauan akan dituangkan oleh Pengawas Pekerjaan dalam berita acara rapat, dan rekamannya diserahkan kepada PPK dan pihak-pihak yang menghadiri rapat.</p> <p>29.3 Mengenai hal-hal dalam rapat yang perlu diputuskan, Pengawas Pekerjaan dapat memutuskan baik dalam rapat atau setelah rapat melalui pernyataan tertulis kepada semua pihak yang menghadiri rapat.</p>
30. Peringatan Dini	30.1 Penyedia berkewajiban untuk memperingatkan sedini mungkin Pengawas Pekerjaan atas peristiwa atau kondisi tertentu yang dapat mempengaruhi mutu pekerjaan, menaikkan Harga Kontrak atau menunda penyelesaian pekerjaan. Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan Penyedia untuk menyampaikan

	<p>secara tertulis perkiraan dampak peristiwa atau kondisi tersebut di atas terhadap Harga Kontrak dan Masa Pelaksanaan. Pernyataan perkiraan ini harus sesegera mungkin disampaikan oleh Penyedia.</p> <p>30.2 Penyedia berkewajiban untuk bekerja sama dengan Pengawas Pekerjaan untuk mencegah atau mengurangi dampak peristiwa atau kondisi tersebut.</p>
<p>B.3 Penyelesaian Kontrak</p>	
<p>31. Serah Terima Pekerjaan</p>	<p>31.1 Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima pertama pekerjaan.</p> <p>31.2 PPK memerintahkan Pengawas Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.</p> <p>31.3 Pemeriksaan dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria/spesifikasi yang tercantum dalam Kontrak.</p> <p>31.4 Hasil pemeriksaan dari Pengawas Pekerjaan disampaikan kepada PPK, apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak dan/atau cacat hasil pekerjaan, PPK memerintahkan Penyedia untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan.</p> <p>31.5 Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak maka PPK dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan.</p> <p>31.6 Pembayaran dilakukan dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. sebesar 95% (sembilan puluh lima perseratus) dari Harga Kontrak sedangkan 5% (lima perseratus) merupakan retensi selama masa pemeliharaan, dalam hal akhir masa pemeliharaan (<i>FHO</i>) masih berada pada tahun anggaran yang sama dengan pembebanan anggaran pada DIPA/DPA; atau b. sebesar 100% (seratus perseratus) dari Harga Kontrak dan Penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima perseratus) dari Harga Kontrak, dalam hal akhir masa pemeliharaan (<i>FHO</i>) melampaui batas akhir tahun anggaran pembebanan anggaran pada DIPA/DPA. <p>31.7 Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama Masa Pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan.</p> <p>31.8 Masa Pemeliharaan paling singkat untuk pekerjaan permanen selama 6 (enam) bulan, sedangkan untuk pekerjaan semi permanen selama 3 (tiga) bulan dan dapat melampaui tahun anggaran. Lamanya Masa Pemeliharaan ditetapkan dalam SSKK.</p> <p>31.9 Setelah Masa Pemeliharaan berakhir, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan akhir pekerjaan.</p> <p>31.10 Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan, Penyedia telah melaksanakan semua kewajibannya selama Masa Pemeliharaan dengan baik dan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak maka PPK dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan.</p>

	<p>31.11 PPK wajib melakukan pembayaran sisa Harga Kontrak yang belum dibayar atau mengembalikan Jaminan Pemeliharaan.</p> <p>31.12 Apabila Penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka Kontrak dapat diputuskan sepihak oleh PPK dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 41.4.</p> <p>31.13 Setelah penandatanganan Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan, PPK menyerahkan hasil pekerjaan kepada PA/KPA.</p> <p>31.14 PA/KPA meminta PPHP untuk melakukan pemeriksaan administratif terhadap hasil pekerjaan yang diserahterimakan.</p> <p>31.15 PPHP melakukan pemeriksaan administratif proses pengadaan barang/jasa sejak perencanaan pengadaan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan, meliputi dokumen Kegiatan/penganggaran, surat penetapan PPK, dokumen perencanaan pengadaan, RUP/SIRUP, dokumen persiapan pengadaan, dokumen pemilihan Penyedia, dokumen Kontrak dan perubahannya serta pengendaliannya, dan dokumen serah terima hasil pekerjaan.</p> <p>31.16 Apabila hasil pemeriksaan administrasi ditemukan ketidaksesuaian/kekurangan, PPHP melalui PA/KPA memerintahkan PPK untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan dokumen administratif.</p> <p>31.17 Hasil pemeriksaan administratif oleh PPHP dituangkan dalam Berita Acara.</p> <p>31.18 Serah terima pekerjaan dapat dilakukan perbagian pekerjaan (secara parsial) yang ketentuannya ditetapkan dalam SSKK.</p> <p>31.19 Bagian pekerjaan yang dapat dilakukan serah terima pekerjaan sebagian atau secara parsial yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. bagian pekerjaan yang tidak tergantung satu sama lain; dan b. bagian pekerjaan yang fungsinya tidak terkait satu sama lain dalam pencapaian kinerja pekerjaan. <p>31.20 Dalam hal dilakukan serah terima pekerjaan secara parsial, maka cara pembayaran, ketentuan denda dan kewajiban pemeliharaan tersebut di atas disesuaikan.</p> <p>31.21 Kewajiban pemeliharaan diperhitungkan setelah serah terima pertama pekerjaan untuk bagian pekerjaan (PHO parsial) tersebut dilaksanakan sampai Masa Pemeliharaan bagian pekerjaan tersebut berakhir sebagaimana yang tercantum dalam SSKK.</p> <p>31.22 Serah terima pertama pekerjaan untuk bagian pekerjaan (PHO parsial) dituangkan dalam Berita Acara.</p>
32. Pengambilalihan	PPK akan mengambil alih lokasi dan hasil pekerjaan dalam jangka waktu tertentu setelah dikeluarkan surat keterangan selesai/pengakhiran pekerjaan.
33. Pedoman Pengoperasian dan Perawatan/ Pemeliharaan	<p>33.1 Penyedia diwajibkan memberikan petunjuk kepada PPK tentang pedoman pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan sesuai dengan SSKK.</p> <p>33.2 Apabila Penyedia tidak memberikan pedoman pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan, PPK berhak menahan uang retensi atau Jaminan</p>

	Pemeliharaan.
B.4 Adendum Kontrak	
34. Perubahan Kontrak	<p>34.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum Kontrak.</p> <p>34.2 Perubahan Kontrak dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, yang diakibatkan beberapa hal berikut meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perubahan pekerjaan; b. perubahan Harga Kontrak; c. perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan/atau Masa Pelaksanaan; dan/atau d. perubahan Kontrak yang disebabkan masalah administrasi. <p>34.3 Untuk kepentingan perubahan Kontrak, PPK dapat meminta pertimbangan dari Pengawas Pekerjaan dan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak.</p>
35. Perubahan Pekerjaan	<p>35.1 Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia dapat melakukan perubahan pekerjaan, yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak; b. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan/pekerjaan; c. mengubah spesifikasi teknis dan/atau gambar pekerjaan; dan/atau d. mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan. <p>35.2 Dalam hal tidak terjadi perubahan kondisi lapangan seperti yang dimaksud pada pasal 35.1 namun ada perintah perubahan dari PPK, PPK bersama Penyedia dapat menyepakati perubahan pekerjaan yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan/pekerjaan; b. mengubah spesifikasi teknis dan/atau gambar pekerjaan; dan/atau c. mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan. <p>35.3 Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPK secara tertulis kepada Penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal.</p> <p>35.4 Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan adendum Kontrak.</p> <p>35.5 Dalam hal perubahan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada pasal 35.1 dan 35.2 mengakibatkan penambahan Harga Kontrak, maka perubahan Kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan Harga Kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari harga yang tercantum dalam Kontrak awal dan tersedianya anggaran.</p> <p>35.6 Ketentuan pasal 35.1 huruf a tidak berlaku untuk bagian pekerjaan lumpsum.</p>
36. Perubahan Harga	<p>36.1 Perubahan Harga Kontrak dapat diakibatkan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perubahan pekerjaan; b. penyesuaian harga; dan/atau c. Peristiwa Kompensasi.

	<p>36.2 Apabila kuantitas mata pembayaran utama yang akan dilaksanakan berubah akibat perubahan pekerjaan lebih dari 10% (sepuluh perseratus) dari kuantitas awal, maka pembayaran volume selanjutnya dengan menggunakan harga satuan yang disesuaikan dengan negosiasi.</p> <p>36.3 Apabila dari hasil evaluasi penawaran terdapat harga satuan timpang, maka harga satuan timpang tersebut hanya berlaku untuk kuantitas pekerjaan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan. Untuk kuantitas pekerjaan tambahan digunakan harga satuan berdasarkan hasil negosiasi.</p> <p>36.4 Apabila ada daftar mata pembayaran yang masuk kategori harga satuan timpang, maka dicantumkan dalam Lampiran A SSKK.</p> <p>36.5 Apabila terdapat perubahan pekerjaan, maka penentuan harga baru dilakukan dengan negosiasi.</p> <p>36.6 Ketentuan penggunaan rumusan penyesuaian harga adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. harga yang tercantum dalam Kontrak dapat berubah akibat adanya penyesuaian harga sesuai dengan peraturan yang berlaku. b. penyesuaian harga diberlakukan pada Kontrak Tahun Jamak dengan yang masa pelaksanaannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan; c. penyesuaian harga satuan diberlakukan mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan; d. penyesuaian harga satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan, biaya tidak langsung (<i>overhead cost</i>) dan harga satuan timpang sebagaimana tercantum dalam penawaran; e. penyesuaian harga satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam Kontrak awal/adendum Kontrak; f. penyesuaian harga satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut; g. jenis pekerjaan baru dengan harga satuan baru sebagai akibat adanya adendum Kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak adendum Kontrak tersebut ditandatangani; h. indeks yang digunakan dalam pelaksanaan Kontrak terlambat disebabkan oleh kesalahan Penyedia adalah indeks terendah antara jadwal Kontrak dan realisasi pekerjaan; i. jenis pekerjaan yang lebih cepat pelaksanaannya diberlakukan penyesuaian harga berdasarkan indeks harga pada saat pelaksanaan. <p>36.7 Ketentuan lebih lanjut terkait penyesuaian harga diatur dalam SSKK.</p> <p>36.8 Ketentuan ganti rugi akibat Peristiwa Kompensasi mengacu pada pasal Peristiwa Kompensasi.</p> <p>36.9 Ketentuan pasal 36.1 huruf b tidak berlaku untuk bagian pekerjaan lumpsum.</p> <p>36.10 Ketentuan pasal 36.2 dan 36.3 hanya berlaku untuk bagian pekerjaan harga satuan.</p>
37. Perubahan Jadwal	37.1 Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dapat diakibatkan oleh:

<p>Pelaksanaan Pekerjaan dan/atau Masa Pelaksanaan</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. perubahan pekerjaan; b. perpanjangan Masa Pelaksanaan; dan/atau c. Peristiwa Kompensasi. <p>37.2 Perpanjangan Masa Pelaksanaan dapat diberikan oleh PPK atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. perubahan pekerjaan; b. Peristiwa Kompensasi; dan/atau c. Keadaan Kahar. <p>37.3 Masa Pelaksanaan dapat diperpanjang paling kurang sama dengan waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar atau waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan akibat dari ketentuan pada pasal 37.2 huruf a atau b.</p> <p>37.4 PPK dapat menyetujui perpanjangan Masa Pelaksanaan atas Kontrak setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh Penyedia dalam jangka waktu sesuai pertimbangan yang wajar setelah Penyedia meminta perpanjangan. Jika Penyedia lalai untuk memberikan peringatan dini atas keterlambatan atau tidak dapat bekerja sama untuk mencegah keterlambatan sesegera mungkin, maka keterlambatan seperti ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memperpanjang Masa Pelaksanaan.</p> <p>37.5 PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan dan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak harus telah menetapkan ada tidaknya perpanjangan dan untuk berapa lama.</p> <p>37.6 Persetujuan perubahan jadwal pelaksanaan dan/atau perpanjangan Masa Pelaksanaan dituangkan dalam Adendum Kontrak.</p> <p>37.7 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Masa Pelaksanaan maka Penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Masa Pelaksanaan berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Masa Pelaksanaan secara tertulis. Perpanjangan Masa Pelaksanaan harus dilakukan melalui adendum Kontrak.</p>
<p>38. Keadaan Kahar</p>	<p>38.1 Contoh Keadaan Kahar tidak terbatas pada: bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, pemogokan, kebakaran, kondisi cuaca ekstrem, dan gangguan industri lainnya.</p> <p>38.2 Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.</p> <p>38.3 Dalam hal terjadi keadaan kahar, PPK atau Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada salah satu pihak secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan bukti serta hasil identifikasi kewajiban dan kinerja pelaksanaan yang terhambat dan/atau akan terhambat akibat Keadaan Kahar tersebut.</p> <p>38.4 Bukti Keadaan Kahar dapat berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pernyataan yang diterbitkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai

	<p>ketentuan peraturan perundang- undangan; dan/atau</p> <p>b. foto/video dokumentasi Keadaan Kahar yang telah diverifikasi kebenarannya.</p> <p>38.5 PPK meminta Pengawas Pekerjaan untuk melakukan penelitian terhadap penyampaian pemberitahuan Keadaan Kahar dan bukti sebagaimana dimaksud pada pasal 38.4.</p> <p>38.6 Dalam Keadaan Kahar, kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Kontrak bukan merupakan cedera janji atau wanprestasi apabila telah dilakukan sesuai pada pasal 38.3. Kewajiban yang dimaksud adalah hanya kewajiban dan kinerja pelaksanaan terhadap pekerjaan/bagian pekerjaan yang terdampak dan/atau akan terdampak akibat dari Keadaan Kahar.</p> <p>38.7 Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, pelaksanaan Kontrak dapat dihentikan. Penghentian Kontrak karena Keadaan Kahar dapat bersifat:</p> <p>a. sementara hingga Keadaan Kahar berakhir; atau</p> <p>b. permanen apabila akibat Keadaan Kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan.</p> <p>38.8 Penghentian Kontrak karena Keadaan Kahar dilakukan secara tertulis oleh PPK dengan disertai alasan penghentian pekerjaan.</p> <p>38.9 Dalam hal pelaksanaan Kontrak dilanjutkan, para pihak dapat melakukan perubahan Kontrak. Masa Pelaksanaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar. Perpanjangan Masa Pelaksanaan dapat melewati Tahun Anggaran.</p> <p>38.10 Selama masa Keadaan Kahar, jika PPK memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk sedapat mungkin meneruskan pekerjaan, maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan kondisi yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam Keadaan Kahar. Penggantian biaya ini harus diatur dalam suatu adendum Kontrak.</p> <p>38.11 Dalam hal pelaksanaan Kontrak dihentikan, para pihak menyelesaikan hak dan kewajiban sesuai Kontrak. Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai setelah dilakukan pengukuran/pemeriksaan bersama atau berdasarkan hasil audit.</p>
B.5 Penghentian dan Pemutusan Kontrak	
39. Penghentian Kontrak	Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada pasal 38.
40. Pemutusan Kontrak	<p>40.1 Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh PPK atau Penyedia.</p> <p>40.2 Pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender setelah PPK/Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia/PPK.</p> <p>40.3 Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak oleh salah satu pihak maka PPK</p>

	<p>membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh PPK dikurangi denda yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada PPK dan selanjutnya menjadi hak milik PPK.</p>
<p>41. Pemutusan Kontrak oleh PPK</p>	<p>41.1 Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PPK dapat melakukan pemutusan Kontrak apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang; b. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang; c. Penyedia berada dalam keadaan pailit; d. Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatanganan Kontrak; e. Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan Kontrak Kritis berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali; f. Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan Pelaksanaan; g. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan; h. berdasarkan penelitian PPK, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan; i. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan; j. Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender dan penghentian ini tidak tercantum dalam jadwal pelaksanaan pekerjaan serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan; atau k. Penyedia mengalihkan seluruh kontrak bukan dikarenakan pergantian nama Penyedia. <p>41.2 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan pada Masa Pelaksanaan karena kesalahan Penyedia, maka:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan; b. sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan); c. Penyedia membayar denda (apabila ada); dan d. Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam <p>41.3 Pencairan jaminan sebagaimana dimaksud pada pasal 41.2 di atas, dicairkan dan disetorkan sesuai ketentuan dalam SSKK.</p> <p>41.4 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan pada Masa Pemeliharaan karena kesalahan Penyedia, maka:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. PPK berhak untuk tidak membayar retensi atau Jaminan Pemeliharaan dicairkan untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan; dan

	<p>b. Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.</p> <p>41.5 Dalam hal terdapat nilai sisa penggunaan uang retensi atau uang pencairan Jaminan Pemeliharaan untuk membiayai pembiayaan/pemeliharaan maka PPK wajib menyetorkan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.</p> <p>41.6 Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak secara sepihak oleh PPK karena kesalahan Penyedia, maka Pokja Pemilihan dapat menunjuk pemenang cadangan berikutnya pada paket pekerjaan yang sama atau Penyedia yang mampu dan memenuhi syarat.</p> <p>41.7 Proses penunjukan langsung dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dijelaskan pada pasal 41.6 mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
42. Pemutusan Kontrak oleh Penyedia	<p>Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak apabila:</p> <p>a. setelah mendapatkan persetujuan PPK, Pengawas Pekerjaan memerintahkan Penyedia untuk menunda pelaksanaan pekerjaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender;</p> <p>b. PPK tidak menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK. Penerbitan SPP untuk kegiatan dengan sumber dana APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.</p>
43. Berakhirnya Kontrak	<p>Kontrak berakhir apabila pekerjaan telah selesai dan hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi.</p>
44. Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dan Kontrak Kritis	<p>42.1 Apabila Penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka PPK harus memberikan peringatan secara tertulis atau memberlakukan ketentuan kontrak kritis.</p> <p>42.2 Kontrak dinyatakan kritis apabila:</p> <p>a. Dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan 0%-70% dari Kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana lebih besar 10%;</p> <p>b. Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70%-100% dari Kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana lebih besar 5%;</p> <p>c. Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70%-100% dari Kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana pelaksanaan kurang dari 5% dan akan melampaui tahun anggaran berjalan.</p> <p>42.3 Penanganan kontrak kritis dilakukan dengan rapat pembuktian (<i>show cause meeting/SCM</i>):</p> <p>a. Pada saat Kontrak dinyatakan kritis, Pengawas Pekerjaan memberikan peringatan secara tertulis kepada Penyedia dan selanjutnya menyelenggarakan Rapat Pembuktian (<i>SCM</i>) Tahap I.</p> <p>b. Dalam <i>SCM</i> Tahap I, PPK, Pengawas Pekerjaan dan Penyedia membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba pertama) yang</p>

	<p>dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap I.</p> <p>c. Apabila Penyedia gagal pada uji coba pertama, maka PPK menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis I dan harus diselenggarakan SCM Tahap II yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam waktu tertentu (uji coba kedua) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap II.</p> <p>d. Apabila Penyedia gagal pada uji coba kedua, maka PPK menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis II dan harus diselenggarakan SCM Tahap III yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam waktu tertentu (uji coba ketiga) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap III.</p> <p>e. Apabila Penyedia gagal pada uji coba ketiga, maka PPK menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis III dan PPK dapat melakukan pemutusan Kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.</p> <p>f. Apabila uji coba berhasil, namun pada pelaksanaan pekerjaan selanjutnya Kontrak dinyatakan kritis lagi maka berlaku ketentuan SCM dari awal.</p>
<p>45. Pemberian Kesempatan</p>	<p>45.1 Dalam hal diperkirakan Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai Masa Pelaksanaan berakhir, namun PPK menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, PPK dapat memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.</p> <p>45.2 Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dimuat dalam addendum Kontrak yang didalamnya mengatur:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Waktu pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan; b. pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia; c. perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan; dan d. sumber dana untuk membiayai penyelesaian sisa pekerjaan yang akan dilanjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya dari DIPA/DPA Tahun Anggaran berikutnya, apabila pemberian kesempatan melampaui Tahun Anggaran. <p>45.3 Pemberian kesempatan kepada Penyedia menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender, sejak Masa Pelaksanaan berakhir.</p> <p>45.4 Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dapat melampaui Tahun Anggaran.</p> <p>45.5 Untuk kegiatan dengan sumber dana APBD, ketentuan pemberian kesempatan yang akan melampaui tahun anggaran mengacu pada peraturan perundang-undangan (Peraturan Menteri Dalam Negeri, Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah atau peraturan lainnya yang sesuai).</p>
<p>46. Peninggalan</p>	<p>Semua bahan, perlengkapan, peralatan, hasil pekerjaan sementara yang masih berada di lokasi kerja setelah pemutusan Kontrak akibat kelalaian atau kesalahan Penyedia, dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh PPK tanpa kewajiban perawatan/pemeliharaan. Pengambilan kembali semua peninggalan tersebut oleh Penyedia hanya dapat dilakukan setelah mempertimbangkan kepentingan PPK.</p>

C. HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA	
47. Hak dan Kewajiban Penyedia	<p>Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Penyedia dalam melaksanakan Kontrak, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak; b. meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak; c. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK; d. melaksanakan, menyelesaikan dan menyerahkan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak; e. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak; f. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK; g. mengambil langkah-langkah yang memadai dalam rangka memberi perlindungan kepada setiap orang yang berada di tempat kerja maupun masyarakat dan lingkungan sekitar yang berhubungan dengan pemindahan bahan baku, penggunaan peralatan kerja konstruksi dan proses produksi; h. melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini; i. hak dan kewajiban lain yang timbul akibat lingkup pekerjaan ditentukan di SSKK.
48. Penggunaan Dokumen- Dokumen Kontrak dan Informasi	<p>Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen Kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan Kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis dan/atau gambar-gambar, serta informasi lain yang berkaitan dengan Kontrak, kecuali dengan izin tertulis dari PPK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
49. Hak Kekayaan Intelektual	<p>Penyedia wajib melindungi PPK dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga yang disebabkan penggunaan atau atas pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual oleh Penyedia.</p>
50. Penanggungungan Risiko	<p>50.1 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan tenaga kerja konstruksi; b. cedera tubuh, sakit atau kematian tenaga kerja konstruksi; c. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau

	<p>kematian pihak ketiga.</p> <p>50.2 Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini, bahan dan perlengkapan merupakan risiko Penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.</p> <p>50.3 Pertanggungans asuransi yang dimiliki oleh Penyedia tidak membatasi kewajiban penganggungan dalam pasal ini.</p> <p>50.4 Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan atau bahan yang menyatu dengan hasil pekerjaan sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan harus diganti atau diperbaiki oleh Penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian Penyedia.</p>
51. Perlindungan Tenaga Kerja	<p>51.1 Penyedia dan Subpenyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan Tenaga Kerja Konstruksinya pada Kegiatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.</p> <p>51.2 Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahkan Tenaga Kerja Konstruksinya untuk mematuhi peraturan keselamatan kerja. Pada waktu pelaksanaan pekerjaan, Penyedia beserta Tenaga Kerja Konstruksinya dianggap telah membaca dan memahami peraturan keselamatan kerja tersebut.</p> <p>51.3 Penyedia berkewajiban untuk menyediakan kepada setiap Tenaga Kerja Konstruksinya (termasuk Tenaga Kerja Konstruksi Subpenyedia, jika ada) perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai.</p> <p>51.4 Tanpa mengurangi kewajiban Penyedia untuk melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, Penyedia wajib melaporkan kepada PPK mengenai setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian.</p>
52. Pemeliharaan Lingkungan	<p>Penyedia berkewajiban untuk mengambil langkah- langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak ketiga dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan lingkungan hidup.</p>
53. Asuransi	<p>53.1 Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan untuk barang yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan dalam pelaksanaan pekerjaan atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan akibat kecelakaan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga.</p> <p>53.2 Penyedia wajib menyediakan asuransi bagi pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di lokasi kerja.</p> <p>53.3 Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam Harga Kontrak.</p>
54. Tindakan Penyedia	<p>54.1 Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis</p>

<p>yang Mensyaratkan Persetujuan PPK atau Pengawas Pekerjaan</p>	<p>PPK sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mensubkontrakkan sebagian pekerjaan dalam Lampiran A SSKK; b. menunjuk Personel Manajerial yang namanya tidak tercantum dalam Lampiran A SSKK; c. mengubah atau memutakhirkan RMPK dan RKK; d. tindakan lain yang diatur dalam SSKK. <p>54.2 Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pengawas Pekerjaan sebelum melakukan tindakan- tindakan berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. melaksanakan setiap tahapan pekerjaan berdasarkan rencana kerja dan metode kerja; b. mengubah syarat dan ketentuan polis asuransi; c. mengubah Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama; d. tindakan lain yang diatur dalam SSKK.
<p>55. Laporan Hasil Pekerjaan</p>	<p>55.1 Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.</p> <p>55.2 Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.</p> <p>55.3 Laporan harian berisi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi pekerjaan; b. penempatan tenaga kerja konstruksi untuk tiap macam tugasnya; c. jenis, jumlah dan kondisi peralatan; d. jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan; e. keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan f. catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan. <p>55.4 Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.</p> <p>55.5 Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.</p> <p>55.6 Untuk merekam kegiatan pelaksanaan pekerjaan konstruksi, PPK dan Penyedia membuat foto-foto dokumentasi dan video pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan sesuai kebutuhan.</p> <p>55.7 Laporan hasil pekerjaan dibuat oleh Penyedia, diperiksa oleh Pengawas Pekerjaan, dan disetujui oleh PPK/pihak PPK.</p>
<p>56. Kepemilikan Dokumen</p>	<p>Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan dokumen-dokumen lain serta piranti lunak yang dipersiapkan oleh Penyedia berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya</p>

	<p>merupakan hak milik PPK. Penyedia paling lambat pada waktu pemutusan atau penghentian atau akhir Masa Kontrak berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen dan piranti lunak tersebut beserta daftar rinciannya kepada PPK. Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen dan piranti lunak tersebut. Pembatasan (jika ada) mengenai penggunaan dokumen dan piranti lunak tersebut di atas di kemudian hari diatur dalam SSKK.</p>
<p>57. Kerjasama Antara Penyedia dan Subpenyedia</p>	<p>57.1 Penyedia hanya boleh melakukan subkontrak sebagian pekerjaan utama kepada Penyedia Spesialis dan/atau pekerjaan bukan pekerjaan utama kepada Penyedia Usaha Kecil.</p> <p>57.2 Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut.</p> <p>57.3 Subpenyedia dilarang mengalihkan atau mensubkontrakkan pekerjaan.</p> <p>57.4 Apabila Penyedia yang ditunjuk merupakan Penyedia Usaha Kecil, maka pekerjaan tersebut harus dilaksanakan sendiri oleh Penyedia yang ditunjuk dan dilarang dialihkan atau disubkontrakkan kepada pihak lain.</p> <p>57.5 Penyedia Usaha Non Kecil yang melakukan kerjasama dengan Subpenyedia hanya boleh melaksanakan sesuai dengan daftar bagian pekerjaan yang disubkontrakkan (apabila ada) yang dituangkan dalam Lampiran A SSKK.</p> <p>57.6 Lampiran A SSKK (Daftar Pekerjaan yang Disubkontrakkan dan Subpenyedia) tidak boleh diubah kecuali atas persetujuan tertulis dari PPK dan dituangkan dalam adendum Kontrak.</p> <p>57.7 Pelaksanaan Kerjasama Antara Penyedia dan Subpenyedia diawasi oleh Pengawas Pekerjaan dan Penyedia melaporkan secara periodik kepada PPK.</p> <p>57.8 Apabila Penyedia melanggar ketentuan sebagaimana diatur pada pasal 57.4 atau 57.5 maka akan dikenakan denda senilai pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut.</p>
<p>58. Penyedia Lain</p>	<p>Penyedia berkewajiban untuk bekerja sama dan menggunakan lokasi kerja termasuk jalan akses bersama-sama dengan Penyedia Lain (jika ada) dan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan atas lokasi kerja. Jika dipandang perlu, PPK dapat memberikan jadwal kerja Penyedia Lain di lokasi kerja.</p>
<p>59. Alih Pengalaman</p>	<p>Dalam hal pelaksanaan paket pekerjaan konstruksi dengan nilai pagu anggaran di atas Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), Penyedia diwajibkan memberikan alih pengalaman/keahlian bidang konstruksi melalui sistem kerja praktik/magang sesuai dengan jumlah yang disepakati pada saat Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia.</p>
<p>60. Pembayaran Denda</p>	<p>Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa denda sebagai akibat wanprestasi atau cedera janji terhadap kewajiban-kewajiban Penyedia dalam Kontrak ini. PPK mengenakan denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia. Pembayaran denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.</p>
<p>61. Jaminan</p>	<p>61.1 Jaminan yang digunakan dalam pelaksanaan Kontrak ini dapat berupa bank garansi atau surety bond. Jaminan bersifat tidak bersyarat, mudah dicairkan, dan harus dicairkan oleh penerbit jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah pencairan dari PPK atau pihak yang diberi kuasa</p>

	oleh PPK diterima.
61.2	Penerbit jaminan selain Bank Umum harus telah ditetapkan/mendapat rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
61.3	Penggunaan Jaminan Pelaksanaan, Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pemeliharaan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> a. paket pekerjaan sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dapat diterbitkan oleh: <ul style="list-style-type: none"> 1) Bank Umum; 2) Perusahaan Asuransi; 3) Perusahaan Penjaminan; 4) lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia; atau 5) Konsorsium Perusahaan Asuransi Umum/Konsorsium Lembaga Penjaminan/Konsorsium Perusahaan Penjaminan yang mempunyai Kegiatan asuransi kerugian (<i>suretyship</i>). b. paket pekerjaan di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dapat diterbitkan oleh: <ul style="list-style-type: none"> 1) Bank Umum; atau 2) Konsorsium Perusahaan Asuransi Umum/Konsorsium Lembaga Penjaminan/Konsorsium Perusahaan Penjaminan yang mempunyai Kegiatan asuransi kerugian (<i>suretyship</i>).
61.4	Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada PPK setelah diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) sebelum dilakukan penandatanganan Kontrak dengan besar: <ul style="list-style-type: none"> a. 5% (lima perseratus) dari Harga Kontrak untuk harga penawaran/penawaran terkoreksi tidak kurang dari 80% (delapan puluh perseratus) nilai total HPS; atau b. 5% (lima perseratus) dari nilai total HPS untuk harga penawaran/penawaran terkoreksi di bawah 80% (delapan puluh perseratus) nilai total HPS.
61.5	Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan paling kurang sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (<i>Provisional Hand Over/PHO</i>).
61.6	Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus perseratus) dan diganti dengan Jaminan Pemeliharaan atau menahan uang retensi sebesar 5% (lima perseratus) dari Harga Kontrak;
61.7	Jaminan Uang Muka diberikan kepada PPK dalam rangka pengambilan uang muka yang besarnya paling kurang sama dengan besarnya uang muka yang akan diterima Penyedia.
61.8	Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan

	<p>sisa uang muka yang diterima.</p> <p>61.9 Masa berlakunya Jaminan Uang Muka paling kurang sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO).</p> <p>61.10 Pengembalian Jaminan Muka dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah Penyedia melunasi uang muka.</p> <p>61.11 Jaminan Pemeliharaan diberikan kepada PPK setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus perseratus).</p> <p>61.12 Pengembalian Jaminan Pemeliharaan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah Masa Pemeliharaan selesai dan pekerjaan diterima dengan baik sesuai dengan ketentuan Kontrak.</p> <p>61.13 Masa berlaku Jaminan Pemeliharaan paling kurang sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan (<i>Final Hand Over/FHO</i>).</p>
C. HAK DAN KEWAJIBAN PPK	
62. Hak dan Kewajiban PPK	<p>Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh PPK dalam melaksanakan Kontrak, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia; b. menerima laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia; c. menerima hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak. d. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia; e. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak; dan f. menilai kinerja Penyedia.
63. Fasilitas	<p>PPK dapat memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya (jika ada) yang tercantum dalam SSKK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan ini.</p>
64. Peristiwa Kompensasi	<p>64.1 Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada Penyedia yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. PPK mengubah jadwal pekerjaan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan; b. keterlambatan pembayaran kepada Penyedia; c. PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan; d. Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam kontrak; e. PPK menginstruksikan kepada pihak Penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan; f. PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan; g. PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan/tidak disebabkan oleh PPK; atau

	<p>h. ketentuan lain dalam SSKK.</p> <p>64.2 Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan Masa Pelaksanaan.</p> <p>64.3 Ganti rugi akibat Peristiwa Kompensasi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata.</p> <p>64.4 Perpanjangan Masa Pelaksanaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.</p> <p>64.5 Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan Masa Pelaksanaan jika Penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.</p>
E. TENAGA KERJA KONSTRUKSI DAN/ATAU PERALATAN PENYEDIA	
65. Tenaga Kerja Konstruksi	<p>65.1 Setiap Tenaga Kerja Konstruksi yang bekerja pada pekerjaan ini wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja.</p> <p>65.2 Tenaga Kerja Konstruksi selain Personel Manajerial yang bekerja/akan bekerja pada pekerjaan ini dan belum memiliki sertifikat kompetensi kerja, maka Penyedia wajib memastikan dipenuhinya persyaratan sertifikat kompetensi kerja sepanjang Masa Pelaksanaan.</p>
66. Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama	<p>66.1 Personel Manajerial yang ditempatkan dan diperkerjakan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran A SSKK.</p> <p>66.2 Peralatan Utama yang ditempatkan dan digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan adalah peralatan yang laik dan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran A SSKK.</p> <p>66.3 Penggantian Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis dari PPK dan dituangkan dalam addendum Kontrak.</p> <p>66.4 Jika penggantian Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama perlu dilakukan, maka Penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari tenaga kerja konstruksi dan/atau peralatan yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun.</p> <p>66.5 PPK dapat menyetujui penempatan/penggantian Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama menurut kualifikasi yang dibutuhkan setelah mendapat rekomendasi dari Pengawas Pekerjaan.</p> <p>66.6 Jika PPK menilai bahwa Personel Manajerial:</p> <ol style="list-style-type: none"> tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik; berkelakuan tidak baik; dan/atau mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya; <p>maka Penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan menjamin Personel Manajerial tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh)</p>

	<p>hari kalender sejak diminta oleh PPK</p> <p>66.7 Personel Manajerial berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan pekerjaannya. Jika diperlukan oleh PPK, Personel Manajerial dapat sewaktu-waktu disyaratkan untuk menjaga kerahasiaan pekerjaan di bawah sumpah.</p> <p>66.8 Apabila ada penambahan Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama maka penambahan tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari PPK dan dituangkan dalam Lampiran A SSKK.</p>
F. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA	
67. Harga Kontrak	<p>67.1 PPK membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam Kontrak sebesar Harga Kontrak.</p> <p>67.2 Harga Kontrak telah memperhitungkan meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. beban pajak; b. keuntungan dan biaya <i>overhead</i> (biaya umum); c. biaya pelaksanaan pekerjaan; dan d. biaya penyelenggaraan keamanan dan kesehatan kerja serta keselamatan konstruksi. <p>67.3 Harga Kontrak bagian pekerjaan harga satuan sesuai dengan rincian yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga dan Harga Kontrak bagian pekerjaan lumsom sesuai dengan Daftar Keluaran dan harga.</p> <p>67.4 Rincian item pekerjaan yang menggunakan jenis kontrak Gabungan Harga Satuan dan Lumpsum dicantumkan dalam Lampiran SSKK.</p>
68. Pembayaran	<p>68.1 Uang muka</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Uang muka dibayar untuk membiayai mobilisasi peralatan/tenaga kerja konstruksi, pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok bahan/material dan/atau untuk persiapan teknis lain. b. Untuk usaha kecil, uang muka dapat diberikan paling tinggi 30% (tiga puluh perseratus) dari Harga Kontrak. c. Untuk usaha non kecil, uang muka dapat diberikan paling tinggi 20% (dua puluh perseratus) dari Harga Kontrak. d. Untuk Kontrak Tahun Jamak, uang muka dapat diberikan paling tinggi 15% (lima belas perseratus) dari Harga Kontrak. e. Besaran uang muka ditentukan dalam SSKK dan dibayar setelah Penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka paling sedikit sebesar uang muka yang diterima. f. Dalam hal diberikan uang muka, maka Penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada PPK disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak dan rencana pengembaliannya. g. PPK harus mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) untuk permohonan tersebut pada huruf f, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Jaminan Uang Muka diterima. Penerbitan SPP untuk kegiatan dengan sumber dana APBD sesuai dengan ketentuan peraturan

	<p>perundang-undangan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.</p> <p>h. Pengembalian uang muka harus diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus perseratus).</p> <p>68.2 Prestasi pekerjaan</p> <p>Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;b. pembayaran dilakukan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh PPK;c. pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang;d. pembayaran dilakukan dengan sistem termin yang ketentuan lebih lanjut diatur dalam SSKK;e. pembayaran harus memperhitungkan:<ul style="list-style-type: none">1) angsuran uang muka;2) denda (apabila ada);3) pajak; dan/atau4) uang retensi.f. untuk Kontrak yang mempunyai subkontrak, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh Subpenyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan. Pembayaran kepada Subpenyedia dilakukan sesuai prestasi pekerjaan yang selesai dilaksanakan oleh Subpenyedia tanpa harus menunggu pembayaran terlebih dahulu dari PPK;g. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan ditandatangani oleh PPK dan Penyedia;h. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari Penyedia diterima harus sudah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM). Penerbitan SPP untuk kegiatan dengan sumber dana APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.i. apabila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta Penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan. <p>68.3 Bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian permanen dari hasil pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam SSKK. Bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan memenuhi ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none">a. bahan dan/atau peralatan yang belum dilakukan uji fungsi (<i>commisioning</i>), serta merupakan bagian dari pekerjaan utama harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:<ul style="list-style-type: none">1) berada di lokasi pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Kontrak dan
--	---

	<p>perubahannya;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2) memiliki sertifikat uji mutu dari pabrikan/produsen; 3) bersertifikat garansi dari produsen/agen resmi yang ditunjuk oleh produsen; 4) disetujui oleh PPK sesuai dengan capaian fisik yang diterima; 5) dilarang dipindahkan dari area lokasi pekerjaan dan/atau dipindah-tangankan oleh pihak manapun; dan 6) keamanan penyimpanan dan risiko kerusakan sebelum diserahkan secara satu kesatuan fungsi merupakan tanggung jawab Penyedia. <ol style="list-style-type: none"> b. sertifikat uji mutu dan sertifikat garansi tidak diperlukan dalam hal peralatan dan/atau bahan dibuat/dirakit oleh Penyedia; c. besaran yang akan dibayarkan dari <i>material on site</i> (berkisar antara 50% sampai dengan 70%); d. ketentuan bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian permanen dari hasil pekerjaan hanya diberlakukan untuk bagian pekerjaan harga satuan. e. besaran nilai pembayaran dan jenis <i>material on site</i> dicantumkan di dalam SSKK. <p>68.4 Denda dan ganti rugi</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada Penyedia, antara lain: denda keterlambatan dalam penyelesaian pelaksanaan pekerjaan, denda keterlambatan dalam perbaikan Cacat Mutu, denda terkait pelanggaran ketentuan subkontrak. b. Ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada PPK maupun Penyedia karena terjadinya cedera janji/wanprestasi. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan. c. Besarnya denda keterlambatan yang dikenakan kepada Penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah: <ol style="list-style-type: none"> 1) 1‰ (satu perseribu) dari harga bagian Kontrak yang tercantum dalam Kontrak (sebelum PPN); atau 2) 1‰ (satu perseribu) dari Harga Kontrak (sebelum PPN); sesuai yang ditetapkan dalam SSKK. d. Besarnya ganti rugi sebagai akibat Peristiwa Kompensasi yang dibayar oleh PPK atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketetapan Bank Indonesia, sepanjang telah diputuskan oleh lembaga yang berwenang; e. Pembayaran denda dan/atau ganti rugi diperhitungkan dalam pembayaran prestasi pekerjaan. f. Ganti rugi kepada Penyedia dapat mengubah Harga Kontrak setelah dituangkan dalam addendum kontrak. g. Pembayaran ganti rugi dilakukan oleh PPK, apabila Penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data- data.
<p>69. Hari Kerja</p>	<p>69.1 Orang hari standar atau satu hari orang bekerja adalah 8 (delapan) jam, terdiri atas 7 (tujuh) jam kerja (efektif) dan 1 (satu) jam istirahat.</p> <p>69.2 Penyedia tidak diperkenankan melakukan pekerjaan apapun di lokasi kerja pada</p>

	<p>waktu yang secara ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai hari libur atau di luar jam kerja normal, kecuali:</p> <ol style="list-style-type: none"> dinyatakan lain di dalam Kontrak; PPK memberikan izin; atau pekerjaan tidak dapat ditunda, atau untuk keselamatan/perlindungan masyarakat, dimana Penyedia harus segera memberitahukan urgensi pekerjaan tersebut kepada Pengawas Pekerjaan dan PPK. <p>69.3 Semua pekerja dibayar selama hari kerja dan datanya disimpan oleh Penyedia. Daftar pembayaran masing-masing pekerja dapat diperiksa oleh PPK.</p> <p>69.4 Untuk pekerjaan yang dilakukan di luar hari kerja efektif dan jam kerja normal harus mengikuti ketentuan Menteri yang membidangi ketenagakerjaan.</p> <p>69.5 Pelaksanaan pekerjaan di luar hari kerja efektif dan/atau jam kerja normal harus diawasi oleh Pengawas Pekerjaan.</p>
70. Perhitungan Akhir	<p>70.1 Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan berita acara serah terima pertama pekerjaan telah ditandatangani oleh kedua pihak.</p> <p>70.2 Sebelum pembayaran terakhir dilakukan, Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan kepada Pengawas Pekerjaan rincian perhitungan nilai tagihan terakhir yang jatuh tempo. PPK berdasarkan hasil penelitian tagihan oleh Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran terakhir paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tagihan dan dokumen penunjang dinyatakan lengkap dan diterima oleh Pengawas Pekerjaan. Penerbitan SPP untuk kegiatan dengan sumber dana APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.</p>
71. Penangguhan	<p>71.1 PPK dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan Penyedia jika Penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya, termasuk penyerahan setiap Hasil Pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.</p> <p>71.2 PPK secara tertulis memberitahukan kepada Penyedia tentang penangguhan hak pembayaran, disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.</p> <p>71.3 Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian Penyedia.</p> <p>71.4 Jika dipandang perlu oleh PPK, penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada Penyedia.</p>
F. PENGAWASAN MUTU	
72. Pengawasan dan Pemeriksaan	PPK mendelegasikan kewenangannya kepada Konsultan Pengawas untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia. PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan

	dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia.
73. Penilaian Pekerjaan Sementara oleh PPK	<p>73.1 PPK dalam Masa Pelaksanaan pekerjaan dapat melakukan penilaian sementara atas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia.</p> <p>73.2 Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap mutu dan kemajuan fisik pekerjaan.</p>
74. Pemeriksaan dan Pengujian Cacat Mutu	<p>74.1 PPK atau Pengawas Pekerjaan akan memeriksa setiap hasil pekerjaan dan memberitahukan Penyedia secara tertulis atas setiap Cacat Mutu yang ditemukan. PPK atau Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan Cacat Mutu, serta menguji hasil pekerjaan yang dianggap oleh PPK atau Pengawas Pekerjaan mengandung Cacat Mutu. Penyedia bertanggung jawab atas perbaikan Cacat Mutu selama Masa Kontrak.</p> <p>74.2 Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan Penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya cacat mutu maka Penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi</p>
75. Perbaikan cacat Mutu	<p>75.1 PPK atau Pengawas Pekerjaan akan menyampaikan pemberitahuan Cacat Mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan Cacat Mutu tersebut. Penyedia bertanggung jawab atas Cacat Mutu selama Masa Kontrak.</p> <p>75.2 Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan.</p> <p>75.3 Jika Penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka PPK, berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan, berhak untuk secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK melakukan perbaikan tersebut. Penyedia segera setelah menerima klaim PPK secara tertulis berkewajiban untuk mengganti biaya perbaikan tersebut. PPK dapat memperoleh penggantian biaya dengan memotong pembayaran atas tagihan Penyedia yang jatuh tempo (jika ada) atau uang retensi atau pencairan Jaminan Pemeliharaan atau jika tidak ada maka biaya penggantian akan diperhitungkan sebagai utang Penyedia kepada PPK yang telah jatuh tempo.</p> <p>75.4 PPK mengenakan denda keterlambatan untuk setiap keterlambatan perbaikan Cacat Mutu dan mengenakan Sanksi Daftar Hitam kepada Penyedia jika tidak melaksanakan perbaikan cacat mutu. Besaran denda keterlambatan dan jangka waktu perbaikan akibat Cacat Mutu ini ditentukan dalam SSKK.</p>
76. Kegagalan Bangunan	<p>76.1 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan PPK) sehubungan dengan klaim kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga</p>

	yang timbul dari kegagalan bangunan.
	76.2 PPK maupun Penyedia berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara semua dokumen yang digunakan dan terkait dengan pelaksanaan ini .
H. PENYELESAIAN PERSELISIHAN	
77. Penyelesaian Perselisihan/ Sengketa	<p>77.1 Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini dengan prinsip dasar musyawarah untuk mencapai kemufakatan.</p> <p>77.2 Dalam hal musyawarah para pihak sebagaimana dimaksud pada pasal 77.1 tidak dapat mencapai suatu kemufakatan, maka penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak dalam Kontrak dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, dewan sengketa (menggantikan mediasi/konsiliasi), dan/atau arbitrase.</p> <p>77.3 Penyelesaian perselisihan/sengketa yang dipilih ditetapkan dalam SSKK.</p>
78. Itikad Baik	<p>78.1 Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam Kontrak.</p> <p>78.2 Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak. Apabila selama Kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.</p>

Pasang Lambe', Senin 15 Agustus 2022

PARA PIHAK

PIHAK PERTAMA

Atas Nama Pengguna Anggaran
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

PIHAK KEDUA

Penyedia Jasa Konstruksi
CV. MATARI ALLO

IRWAN, ST

NIP. : 19820526 201101 1 008

HARTLAND SALEH

Direktur



**PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**

Jl. : Pasang Lambe' Kec. Tondon

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

No.	Pasal dalam SSUK	Ketentuan	Data
1.	4.1 & 4.2	Korespondensi	<p>Alamat para Pihak sebagai berikut:</p> <p>PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)</p> <p>Satuan Kerja : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang</p> <p>Nama : Irwan, ST</p> <p>Alamat : Jl. Pasang lambe' Panga' Kec. Tondon</p> <p><i>e-mail</i> : irwan.ji.mzg@gmail.com</p> <p>Penyedia</p> <p>Nama : CV. MATARI ALLO</p> <p>Wakil Penyedia : Hartland Saleh</p> <p>Alamat : Jl. Kijang No. 33 Toraja Utara</p> <p>Telepon : 082279889771</p> <p><i>e-mail</i> : matariallo2019@gmail.com</p>
2.	4.2 & 5.1	Wakil Sah Para Pihak	<p>Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:</p> <p>Untuk PPK</p> <p>Nama : Irwan, ST</p> <p>Sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perkerjaan Umum dan Tata Ruang selaku Pengguna Anggaran Nomor Nomor 03/DPUPR/II/2022, tanggal 18 Februari 2022, tentang tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Pengadaan, Panitia Peneliti Kontrak, Direksi Teknis Dan Direksi Administrasi, Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2022</p> <p>Untuk Penyedia</p> <p>Nama : CV. MATARI ALLO</p> <p>Penyedia Jasa Konstruksi berdasarkan Akta Notaris Nomor</p>

			14 tanggal 10 September 1993 yang dikeluarkan oleh Notaris DORKAS LATANNA, SH. dan akta perubahan Nomor 13 tanggal 20 April 2020 yang dikeluarkan oleh Notaris ALEXANDER SAMBENGA, SH dalam hal ini berkedudukan sebagai pihak yang berwenang bertindak untuk dan atas nama CV. MATARI ALLO berkantor di Jalan Kijang No. 33 Toraja Utara, Telpon. 082279889771, Email : matariallo2019@gmail.com.
3.	19.3	Penyerahan Lokasi Pekerjaan	Lokasi pekerjaan yang telah dituangkan dalam kontrak pasal 4 yang dilaksanakan merupakan satu kesatuan meliputi : 1).Ruas Singki' – Pemanikan 2).Ruas Karre Limbong – Karre Penanian
4.	6.3; 41.3; & 41.5	Pencairan Jaminan	Jaminan dicairkan dan disetorkan pada Kas Daerah Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Toraja Utara
5.	27.1	Masa Pelaksanaan	Masa Pelaksanaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK.
6.	31.8	Masa Pemeliharaan	Masa Pemeliharaan berlaku selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO).
7.	33.1	Pedoman Pengoperasian dan Perawatan/ Pemeliharaan	Gambar "As built" dan/atau pedoman pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan harus diserahkan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan.
8.	36.7	Penyesuaian Harga	Penyesuaian harga tidak diberikan
9.	42.b	Pembayaran Tagihan	Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PPK untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh PPK.
10.	47.(i)	Hak dan Kewajiban Penyedia	Hak dan kewajiban Penyedia : a. Mengikuti pedoman teknis yang dipersyaratkan. b. Mendapatkan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak Kerja. Hak dan kewajiban Penyedia : a. Wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan b. Bertanggung jawab penuh terhadap pekerjaan yang dihasilkan, sesuai yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, yaitu bertanggungjawab atas :

			<ul style="list-style-type: none"> ❖ Pelaksanaan Kontrak; ❖ Kualitas Barang/Jasa; ❖ Ketepatan perhitungan jumlah dan volume; ❖ Ketepatan waktu penyerahan; dan ❖ Ketepatan tempat penyerahan <p>Serta bertanggungjawab apabila dikemudian hari terdapat kerugian negara terhadap hasil pekerjaan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.</p> <p>c. Wajib mendampingi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dalam kunjungan lapangan, ataupun pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh pihak/instansi/Lembaga yang berwenang.</p> <p>d. Wajib dan hadir untuk memberikan tanggapan, klarifikasi terhadap pemeriksaan hasil pekerjaan yang dilakukan oleh pihak/instansi/Lembaga yang berwenang.</p>
11.	54.1.(d)	Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan PPK	<p>Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan PPK adalah: Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis PPK sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. mensubkontrakkan sebagian pekerjaan dalam Lampiran A SSKK; b. menunjuk Personel Manajerial yang namanya tidak tercantum dalam Lampiran A SSKK; c. mengubah atau memutakhirkan RMPK dan RKK;
12.	54.2.(d)	Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pengawas Pekerjaan	<p>Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pengawas Pekerjaan sebelum melakukan tindakan- tindakan berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. melaksanakan setiap tahapan pekerjaan berdasarkan rencana kerja dan metode kerja; b. mengubah syarat dan ketentuan polis asuransi; c. mengubah Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama;
13.	68.1.(e)	Besaran Uang Muka	<p>Pekerjaan Konstruksi ini dapat diberikan uang muka : YA</p> <p>Uang muka diberikan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Harga Kontrak.</p>
14.	68.2.(d)	Pembayaran Prestasi Pekerjaan	<p>Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara Termin, Termin 1 realisasi prestasi pekerjaan 30 % (tiga puluh persen); Termin 2 realisasi prestasi pekerjaan 75 % (tujuh puluh lima persen) dan Termin 3 realisasi prestasi pekerjaan 100% (seratus persen).</p> <p>Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan Pembayaran termin 2. Rincian Pembayaran 3. Laporan Kemajuan fisik 4. Foto Kegiatan 5. Hasil verifikasi tim teknis (jika ada) <p>Pembayaran prestasi pekerjaan akan ditujukan pada rekening Bank Umum milik perusahaan yakni :</p>

			Nama Bank : SULSELBAR CABANG RANTEPAO Nomor Rekening : 111-003-000000084-4 Atas Nama : CV. MATARI ALLO
15.	68.4.(c)	Denda akibat Keterlambatan	Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari harga bagian kontrak (sebelum PPN) yang belum dilaksanakan, dan yang tercantum dalam Kontrak 1. Bagian dari kontrak yang dimaksud adalah item pekerjaan dalam Daftar Kuantitas Harga 2. Item bagian kontrak tersebut diatas adalah item pekerjaan terdapat pada masing-masing Daftar Kuantitas Harga ruas penanganan
16.	75.4	Perbaikan Cacat Mutu	Denda keterlambatan akibat Cacat Mutu untuk setiap hari keterlambatan adalah sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari biaya perbaikan cacat mutu. Jangka waktu perbaikan cacat mutu sesuai dengan perkiraan waktu yang diperlukan untuk perbaikan dan ditetapkan oleh PPK.
17.	77.4	Penyelesaian Perselisihan/ Sengketa	Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka para pihak sepakat menyelesaikan perselisihan/sengketa melalui: Arbitrase menunjuk Pengadilan Negeri Toraja.

Pasang Lambe', Senin 15 Agustus 2022

PARA PIHAK

PIHAK PERTAMA

Atas Nama Pengguna Anggaran
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

PIHAK KEDUA

Penyedia Jasa Konstruksi
CV. MATARI ALLO

IRWAN, ST

NIP. : 19820526 201101 1 008

HARTLAND SALEH

Direktur

Paket : Peningkatan Jalan Ruas Kabupaten Paket 1

Ruas : Karre Penanian - Karre Limbong

Daftar 1 : MATA PEMBAYARAN UMUM

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan Ukuran	Kuantitas	Harga Satuan (Rp.)	Total Harga (Rp.)
	DIVISI 1. UMUM				
1.2	Mobilisasi	Ls	1.00	24,100,000.00	24,100,000.00
	Total Daftar 1				24,100,000.00

Daftar 2 : MATA PEMBAYARAN PEKERJAAN UTAMA

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan Ukuran	Kuantitas	Harga Satuan (Rp.)	Total Harga (Rp.)
	DIVISI 2. SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK)				
2.3(2)	APD antara lain :				
	Alat Pelindung Diri terdiri dari :				
	- Topi Pelindung (Safety Helmet)	Bh	20.00	50,000.00	1,000,000.00
	- Sarung Tangan (Safety Gloves)	Psg	20.00	20,000.00	400,000.00
	- Sepatu Keselamatan (Safety Shoes)	Bh	20.00	100,000.00	2,000,000.00
	- Rompi keselamatan (Safety Vest)	Bh	20.00	30,000.00	600,000.00
2.6	Fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan				
	- Peralatan P3K	Set	1.00	500,000.00	500,000.00
2.7	Rambu dan Perlengkapan lalu lintas yang diperlukan atau manajemen lalu lintas				
2.7(3)	- Rambu Peringatan	Bh	9.00	100,000.00	900,000.00
2.7(8)	- Kerucut Lalu Lintas (Traffic Cone)		6.00	150,000.00	900,000.00
2.7(19)	- Police Line	Bh	1.00	50,000.00	50,000.00
	DIVISI 3. DRAINASE				
3.1(1)	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	M3	2,302.94	46,913.38	108,038,699.34
3.2(1)	Pasangan Batu dengan Mortar	M3	567.76	971,748.76	551,720,075.98
3.3(6)	Gorong-Gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 80 cm	M1	10.00	2,215,712.13	22,157,121.30
	DIVISI 4. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK				
4.3(1)	Galian Struktur dengan Kedalaman 0 - 2 Meter	M3	-	65,267.89	-
4.3(1)	Timbunan Pilihan dari sumber galian	M3	311.80	333,453.67	103,970,854.31
4.3(1)	Penyiapan Badan Jalan	M2	-	1,544.42	-

	DIVISI 6. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN				
6.1(1)	Lapis Pondasi Agregat A	M3	535.50	634,232.89	339,631,712.60
	DIVISI 7. PERKERASAN ASPAL				
7.1(1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	2,856.00	22,137.99	63,226,099.44
7.1(2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	535.50	23,297.42	12,475,768.41
7.3(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	321.30	1,544,433.10	496,226,355.03
7.3(6a)	Laston Lapis Aus (AC-BC)	Ton	481.95	1,364,449.69	657,596,528.10
	DIVISI 8. STRUKTUR				
8.1(7a)	Beton Struktur fc'20 Mpa (K-250)	M3	-	1,769,973.02	-
8.1(8)	Beton fc'15 Mpa (K-175)	M3	347.00	1,179,590.52	409,317,910.44
8.3(1)	Baja Tulangan Polos U24	Kg	-	19,872.00	-
8.9(1)	Pasangan Batu	M3	-	993,436.53	-
8.14(1)	Pembongkaran Pasangan Batu	M3	-	379,770.15	-
8.14(2)	Pembongkaran Beton	M3	-	435,792.44	-
8.16(4)	Pipa Penyalur PVC Dia 2,5"	M1	-	69,575.00	-
	DIVISI 10. PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN				
10.2(1)	Marka Jalan Termoplastis	M2	286.08	197,040.67	56,369,394.87
10.2(5)	Patok Pengarah (Delineator)	Buah	-	436,715.21	-
Total Daftar 2					2,827,080,519.80

DAFTAR REKAPITULASI

Mata Pembayaran	Harga (Rp.)
Daftar No. 1 Mata Pembayaran Umum	24,100,000.00
Daftar No. 2 Mata Pembayaran Pekerjaan Utama	2,827,080,519.80
Jumlah Daftar (1 + 2)	2,851,180,519.80
PPN (11 %)	313,629,857.18
Total Nilai	3,164,810,376.98
Dibulatkan	3,164,810,376.00
#NAME?	

Item Baru Galian Biasa

Paket : Peningkatan Jalan Ruas Kabupaten Paket 1
Ruas : Singki - Pemanikan

Daftar 1 : MATA PEMBAYARAN UMUM

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan Ukuran	Kuantitas	Harga Satuan (Rp.)	Total Harga (Rp.)
	DIVISI 1. UMUM				
1.2	Mobilisasi	Ls	1.00	24,100,000.00	24,100,000.00
Total Daftar 1					24,100,000.00

Daftar 2 : MATA PEMBAYARAN PEKERJAAN UTAMA

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan Ukuran	Kuantitas	Harga Satuan (Rp.)	Total Harga (Rp.)
	DIVISI 2. SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK)				
2.3(2)	APD antara lain :				
	Alat Pelindung Diri terdiri dari :				
	- Topi Pelindung (Safety Helmet)	Bh	20.00	50,000.00	1,000,000.00
	- Sarung Tangan (Safety Gloves)	Psg	20.00	20,000.00	400,000.00
	- Sepatu Keselamatan (Safety Shoes)	Bh	20.00	100,000.00	2,000,000.00
	- Rompi keselamatan (Safety Vest)	Bh	20.00	30,000.00	600,000.00
2.6	Fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan				
	- Peralatan P3K	Set	1.00	500,000.00	500,000.00
2.7	Rambu dan Perlengkapan lalu lintas yang diperlukan atau manajemen lalu lintas				
2.7(3)	- Rambu Peringatan	Bh	8.00	100,000.00	800,000.00
2.7(8)	- Kerucut Lalu Lintas (Traffic Cone)		4.00	150,000.00	600,000.00
2.7(19)	- Police Line	Bh	1.00	50,000.00	50,000.00
	DIVISI 3. DRAINASE				
3.1(1)	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	M3	37.64	46,913.38	1,765,819.62
3.2(1)	Pasangan Batu dengan Mortar	M3	30.68	971,748.76	29,813,251.96
	DIVISI 4. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK				
4.3(1)	Galian Struktur dengan Kedalaman 0 - 2 Meter	M3	5.70	65,267.89	372,026.97
4.3(1)	Timbunan Pilihan dari sumber galian	M3	651.38	333,453.67	217,205,051.56
4.3(1)	Penyiapan Badan Jalan	M2	92.40	1,544.42	142,704.41

	DIVISI 6. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN				
6.1(1)	Lapis Pondasi Agregat A	M3	1,520.63	634,232.89	964,433,559.52
	DIVISI 7. PERKERASAN ASPAL				
7.1(1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	7,490.00	22,137.99	165,813,545.10
7.1(2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	1,763.56	23,297.42	41,086,398.02
7.3(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	964.69	1,544,433.10	1,489,899,167.24
7.3(6a)	Laston Lapis Aus (AC-BC)	Ton	1,422.56	1,364,449.69	1,941,011,551.01
	DIVISI 8. STRUKTUR				
8.1(7a)	Beton Struktur fc'20 Mpa (K-250)	M3	1.88	1,769,973.02	3,327,549.28
8.1(8)	Beton fc'15 Mpa (K-175)	M3	628.00	1,179,590.52	740,782,846.56
8.3(1)	Baja Tulangan Polos U24	Kg	995.30	19,872.00	19,778,601.60
8.9(1)	Pasangan Batu	M3	117.08	993,436.53	116,311,548.93
8.14(1)	Pembongkaran Pasangan Batu	M3	4.16	379,770.15	1,579,843.82
8.14(2)	Pembongkaran Beton	M3	6.04	435,792.44	2,632,186.34
8.16(4)	Pipa Penyalur PVC Dia 2,5"	M1	66.00	69,575.00	4,591,950.00
	DIVISI 10. PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN				
10.2(1)	Marka Jalan Termoplastis	M2	695.40	197,040.67	137,022,081.92
10.2(5)	Patok Pengarah (Delineator)	Buah	185.00	436,715.21	80,792,313.85
Total Daftar 2					5,964,311,997.71

DAFTAR REKAPITULASI

Mata Pembayaran	Harga (Rp.)
Daftar No. 1 Mata Pembayaran Umum	24,100,000.00
Daftar No. 2 Mata Pembayaran Pekerjaan Utama	5,964,311,997.71
Jumlah Daftar (1 + 2)	5,988,411,997.71
PPN (11 %)	658,725,319.75
Total Nilai	6,647,137,317.45
Dibulatkan	6,647,137,317.00
#NAME?	

Paket : Peningkatan Jalan Ruas Kabupaten Paket 1

Ruas : Singki - Pemanikan & Karre Penanian - Karre Limbong

Daftar 1 : MATA PEMBAYARAN UMUM

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan Ukuran	Kuantitas	Harga Satuan (Rp.)	Total Harga (Rp.)
	DIVISI 1. UMUM				
1.2	Mobilisasi	Ls	2.00	24,100,000.00	48,200,000.00
Total Daftar 1					48,200,000.00

Daftar 2 : MATA PEMBAYARAN PEKERJAAN UTAMA

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan Ukuran	Kuantitas	Harga Satuan (Rp.)	Total Harga (Rp.)
	DIVISI 2. SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK)				
2.3(2)	APD antara lain :				
	Alat Pelindung Diri terdiri dari :				
	- Topi Pelindung (Safety Helmet)	Bh	40.00	50,000.00	2,000,000.00
	- Sarung Tangan (Safety Gloves)	Psg	40.00	20,000.00	800,000.00
	- Sepatu Keselamatan (Safety Shoes)	Bh	40.00	100,000.00	4,000,000.00
	- Rompi keselamatan (Safety Vest)	Bh	40.00	30,000.00	1,200,000.00
2.6	Fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan				
	- Peralatan P3K	Set	2.00	500,000.00	1,000,000.00
2.7	Rambu dan Perlengkapan lalu lintas yang diperlukan atau manajemen lalu lintas				
2.7(3)	- Rambu Peringatan	Bh	17.00	100,000.00	1,700,000.00
2.7(8)	- Kerucut Lalu Lintas (Traffic Cone)	Bh	10.00	150,000.00	1,500,000.00
2.7(19)	- Police Line	Bh	2.00	50,000.00	100,000.00
	DIVISI 3. DRAINASE				
3.1(1)	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	M3	2,340.58	46,913.38	109,804,518.96
3.2(1)	Pasangan Batu dengan Mortar	M3	598.44	971,748.76	581,533,327.93
3.3(6)	Gorong-Gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 80 cm	M1	10.00	2,215,712.13	22,157,121.30
	DIVISI 4. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK				
4.3(1)	Galian Struktur dengan Kedalaman 0 - 2 Meter	M3	5.70	65,267.89	372,026.97
4.3(1)	Timbunan Pilihan dari sumber galian	M3	963.18	333,453.67	321,175,905.87
4.3(1)	Penyiapan Badan Jalan	M2	92.40	1,544.42	142,704.41

	DIVISI 6. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN				
6.1(1)	Lapis Pondasi Agregat A	M3	2,056.13	634,232.89	1,304,065,272.12
	DIVISI 7. PERKERASAN ASPAL				
7.1(1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	10,346.00	22,137.99	229,039,644.54
7.1(2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	2,299.06	23,297.42	53,562,166.43
7.3(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	1,285.99	1,544,433.10	1,986,125,522.27
7.3(6a)	Laston Lapis Aus (AC-BC)	Ton	1,904.51	1,364,449.69	2,598,608,079.10
	DIVISI 8. STRUKTUR				
8.1(7a)	Beton Struktur fc'20 Mpa (K-250)	M3	1.88	1,769,973.02	3,327,549.28
8.1(8)	Beton fc'15 Mpa (K-175)	M3	975.00	1,179,590.52	1,150,100,757.00
8.3(1)	Baja Tulangan Polos U24	Kg	995.30	19,872.00	19,778,601.60
8.9(1)	Pasangan Batu	M3	117.08	993,436.53	116,311,548.93
8.14(1)	Pembongkaran Pasangan Batu	M3	4.16	379,770.15	1,579,843.82
8.14(2)	Pembongkaran Beton	M3	6.04	435,792.44	2,632,186.34
8.16(4)	Pipa Penyalur PVC Dia 2,5"	M1	66.00	69,575.00	4,591,950.00
	DIVISI 10. PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN				
10.2(1)	Marka Jalan Termoplastis	M2	981.48	197,040.67	193,391,476.79
10.2(5)	Patok Pengarah (Delineator)	Buah	185.00	436,715.21	80,792,313.85
Total Daftar 2					8,791,392,517.51

DAFTAR REKAPITULASI

Mata Pembayaran	Harga (Rp.)
Daftar No. 1 Mata Pembayaran Umum	48,200,000.00
Daftar No. 2 Mata Pembayaran Pekerjaan Utama	8,791,392,517.51
Jumlah Daftar (1 + 2)	8,839,592,517.51
PPN (11 %)	972,355,176.93
Total Nilai	9,811,947,694.44
Dibulatkan	9,811,947,694.00
Terbilang : Sembilan Milyar Delapan Ratus Sebelas Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah	

mempunyai kekuatan mengikat dan berlaku sebagai Undang-Undang bagi PARA PIHAK berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

- (3) Dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah dokumen-dokumen sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 dan dokumen-dokumen yang diterbitkan menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku.

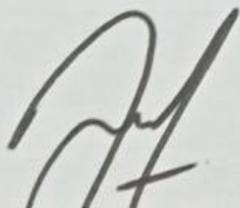
Pasal 22
PENUTUP

- (1) Kontrak Kerja ini ditandatangani oleh PARA PIHAK di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tercantum pada awal Kontrak Kerja ini.
- (2) Kontrak Kerja beserta lampiran-lampirannya merupakan bagian tak terpisahkan, dibuat dalam rangkap 7 (tujuh) dengan dua asli bermaterai Rp. 10.000,00 asli pertama untuk PIHAK PERTAMA dan asli kedua untuk PIHAK KEDUA dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PARA PIHAK

PIHAK PERTAMA

Atas Nama Pengguna Anggaran
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)



IRWAN, ST
NIP. : 19820526 201101 1 008

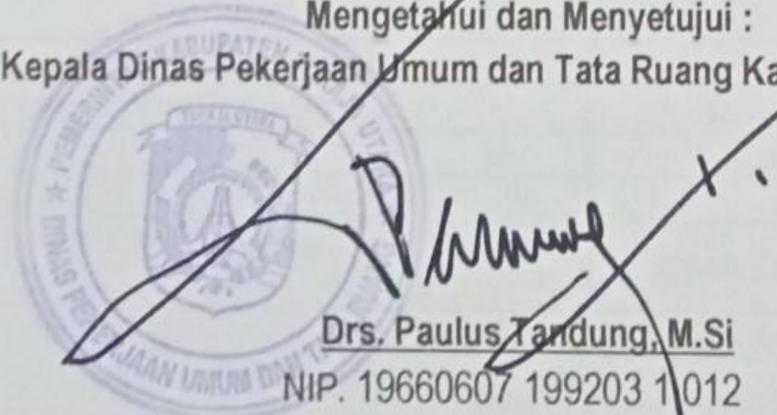
PIHAK KEDUA

Penyedia Jasa Konstruksi
CV. MATARI ALLO



HARTLAND SALEH
Direktur

Mengetahui dan Menyetujui :
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab.Toraja Utara/PA



Drs. Paulus Tandung, M.Si
NIP. 19660607 199203 1 012

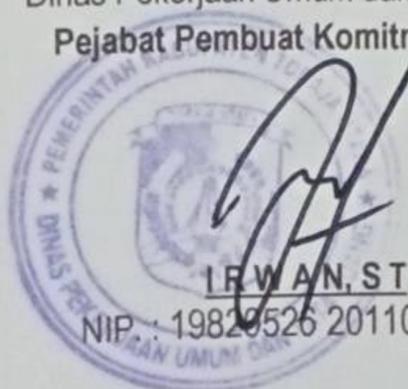
		yang timbul dari kegagalan bangunan.
	76.2	PPK maupun Penyedia berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara semua dokumen yang digunakan dan terkait dengan pelaksanaan ini .
H. PENYELESAIAN PERSELISIHAN		
77. Penyelesaian Perselisihan/ Sengketa	77.1	Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini dengan prinsip dasar musyawarah untuk mencapai kemufakatan.
	77.2	Dalam hal musyawarah para pihak sebagaimana dimaksud pada pasal 77.1 tidak dapat mencapai suatu kemufakatan, maka penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak dalam Kontrak dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, dewan sengketa (menggantikan mediasi/konsiliasi), dan/atau arbitrase.
	77.3	Penyelesaian perselisihan/sengketa yang dipilih ditetapkan dalam SSKK.
78. Itikad Baik	78.1	Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam Kontrak.
	78.2	Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak. Apabila selama Kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.

Pasang Lambe', Senin 15 Agustus 2022

PARA PIHAK

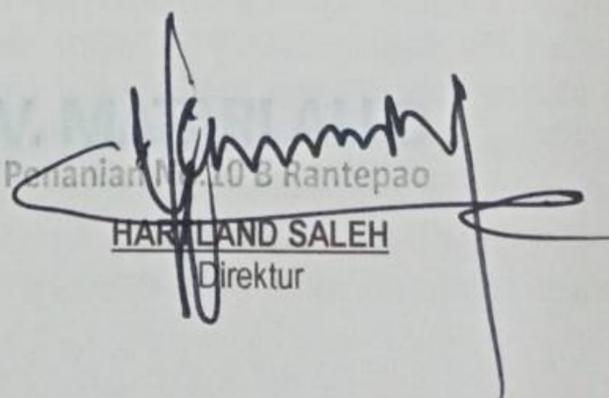
PIHAK PERTAMA

Atas Nama Pengguna Anggaran
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)


IRWAN, ST
NIP. 19820526 201101 1 008

PIHAK KEDUA

Penyedia Jasa Konstruksi
CV. MATARI ALLO


HARLAND SALEH
Direktur

			Nama Bank : SULSELBAR CABANG RANTEPAO Nomor Rekening : 111-003-000000084-4 Atas Nama : CV. MATARI ALLO
15.	68.4.(c)	Denda akibat Keterlambatan	Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari harga bagian kontrak (sebelum PPN) yang belum dilaksanakan, dan yang tercantum dalam Kontrak 1. Bagian dari kontrak yang dimaksud adalah item pekerjaan dalam Daftar Kuantitas Harga 2. Item bagian kontrak tersebut diatas adalah item pekerjaan terdapat pada masing-masing Daftar Kuantitas Harga ruas penanganan
16.	75.4	Perbaikan Cacat Mutu	Denda keterlambatan akibat Cacat Mutu untuk setiap hari keterlambatan adalah sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari biaya perbaikan cacat mutu. Jangka waktu perbaikan cacat mutu sesuai dengan perkiraan waktu yang diperlukan untuk perbaikan dan ditetapkan oleh PPK.
17.	77.4	Penyelesaian Perselisihan/ Sengketa	Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka para pihak sepakat menyelesaikan perselisihan/sengketa melalui: Arbitrase menunjuk Pengadilan Negeri Toraja.

Pasang Lambe', Senin 15 Agustus 2022

PARA PIHAK

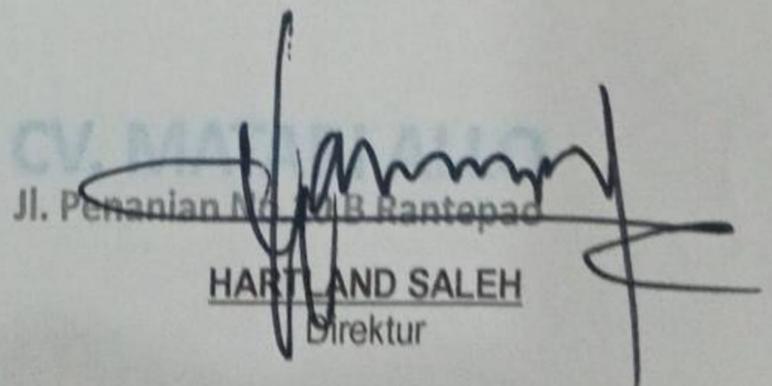
PIHAK PERTAMA

Atas Nama Pengguna Anggaran
 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)



PIHAK KEDUA

Penyedia Jasa Konstruksi
CV. MATARI ALLO





PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Jl. : Pasang Lambe' Kec. Tondon

SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ)

Nomor : 03/SPPBJ/PUTR-BHJP/VIII/2022 Pasang Lambe, 12 Agustus 2022
Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Penunjukan Penyedia Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Kabupaten Paket 1
Kegiatan Bantuan Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2022

Kepada :
Yth. : **Direktur CV. MATARI ALLO**
Di
Jl. Kijang No. 33 , Toraja Utara

Berdasarkan Penetapan Pemenang Tender Pekerjaan Nomor : 059/BA.LHP/JK/UKPBJ/VIII/2022, tanggal 09 agustus 2022, dan Berita Acara Rapat Pre Award Meeting (PAM) Nomor : 03/BA-PAM/PUTR-BHJP/VIII/2022, Tanggal 12 Agustus 2022 dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara melalui SPSE No. 014/MA/PENAWARAN/VII/2022, Tanggal 28 juli 2022 dengan harga penawaran sebesar Rp. 9.811.947.694,44 (Sembilan Milyar Delapan Ratus Sebelas Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribuh Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Koma Empat Empat Rupiah) kami menyatakan diterima dan disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) ini saudara di haruskan untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan yang di terbitkan oleh Bank Umum, perusahaan penjamin atau perusahaan asuransi yang mempunyai program surety bond, dengan nilai sebesar 5% dari total Penawaran sebesar Rp. 490.597.385,00 (Empat ratus sembilan puluh juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah) dengan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan sampai dengan tanggal 26 Desember 2022, dan segera menandatangani kontrak paling lambat tanggal 22 Agustus 2022.

Dalam hal saudara melakukan kegagalan penunjukan ini, maka akan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Pejabat Pembuat Komitmen



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Toraja Utara/PA di Pasang Lambe';
2. Inspektur Kab. Toraja Utara di Pasang Lambe';
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Toraja Utara di Marante;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
5. Kepala UKPBJ Kab. Toraja Utara di Marante;
6. Arsip.



JAMINAN PELAKSANAAN

No. Bond : 111001102082200266

Nilai Jaminan : Rp 490,597,385.00

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami CV MATARI ALLO, Jl. Penanian No. 10 B Rantepao Kabupaten Toraja Utara sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT ASURANSI JASARAHARJA PUTERA, Jl. Lanto Dg Pasewang No. 25 A selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KAB. TORAJA UTARA, Jl. Pasang Lambe' Kecamatan Tondon sebagai pemilik pekerjaan selanjutnya disebut sebagai PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp 490,597,385.00 (EMPAT RATUS SEMBILAN PULUH JUTA LIMA RATUS SEMBILAN PULUH TUJUH RIBU TIGA RATUS DELAPAN PULUH LIMA RUPIAH).
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan Pekerjaan PENINGKATAN JALAN RUAS KABUPATEN PAKET 1 KEGIATAN BANTUAN KEUANGAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022 yang telah dipercayakan kepadanya atas dasar Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dari PENERIMA JAMINAN No. 03/SPPBJ/PUTR-BHJP/VIII/2022, Tanggal 12 Agustus 2022.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 134 (SERATUS TIGA PULUH EMPAT) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022.
4. Jaminan ini berlaku apabila :
 - a. TERJAMIN tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
 - b. Pemutusan Kontrak akibat kesalahan TERJAMIN;
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai Jaminan tersebut diatas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima Tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasarkan Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

CV MATARI ALLO

Dikeluarkan di Makassar
pada tanggal 15 Agustus 2022
Penanggung

PT ASURANSI JASARAHARJA PUTERA

CV. MATARI ALLO
Jl. Penanian No. 10 B Rantepao

Harland Saleh
Direktur

Idaru Rama Hildhan Ali Edden
Branch Business I Section As

Billy Andhika Putra
Branch Business II Section Ass

Note :

1. Dokumen ini dibubuhi tanda tangan elektronik melalui mekanisme approval dari sistem
2. Dokumen ini sah jika dibubuhi cap perusahaan
3. Keabsahan polis/bond ini dapat diverifikasi secara online melalui website <http://www.jasaraharja-putera.co.id> atau dengan scan QR Code/Barcode di pojok kanan atas dokumen ini menggunakan handphone yang memiliki aplikasi QR Code Reader



PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Jl. : Pasang Lambe' Kec. Tondon

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : 03/SPMK/PUTR-BHJP/VIII/2022

Paket Pekerjaan:

PENINGKATAN JALAN RUAS KABUPATEN PAKET 1
KEGIATAN BANTUAN KEUANGAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IRWAN, ST
Alamat : Jl. Pasang Lambe' Panga'

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

Berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 03/SP/PUTR-BHJP/VIII/2022, Tanggal 15 Agustus 2022,
bersama ini memerintahkan:

Nama : CV. MATARI ALLO

Alamat : Jl. Kijang No. 33 , Toraja Utara Tlpn. 08227988771; Email: matariallo2019@gmail.com

yang dalam hal ini diwakili oleh: HARTLAND SALEH

selanjutnya disebut sebagai Kontraktor Pelaksana;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Macam pekerjaan : Peningkatan Jalan Ruas Kabupaten Paket 1 Kegiatan Bantuan Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2022;
2. Tanggal mulai kerja : 24 Agustus 2022;
3. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan kontrak;
4. Waktu penyelesaian : selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 21 Desember 2022;
5. Hasil Pekerjaan : Peningkatan Jalan Ruas Kabupaten Paket 1 Kegiatan Bantuan Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan (Ruas Singki'-Pemanikan dan Ruas Karre Penanian-Karre Limbong)
6. Sanksi : Terhadap keterlambatan penyerahan hasil pekerjaan, Kontrak pengadaan jasa konstruksi dan pembayaran kepada penyedia dapat dihentikan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak.

Pasang lambe' 24 Agustus 2022

Untuk dan atas nama
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Toraja Utara
Pejabat Pembuat Komitmen



Menerima dan menyetujui:
Untuk dan atas nama
CV/MATARI ALLO

H. Perjanjian No.10 B Rantepaan
HARTLAND SALEH
Direktur